

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Bogor terletak diantara $6^{\circ}18'0''$ – $6^{\circ}47'10''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}23'45''$ – $107^{\circ}13'30''$ Bujur Timur dan secara wilayah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi
- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
- Bagian Tengah : Kota Bogor



Gambar 2.1. Letak Geografis Kabupaten Bogor

Luas wilayah Kabupaten Bogor $\pm 298.838,304$ Ha dan secara administratif terbagi ke dalam 40 Kecamatan, 413 desa dan 17 kelurahan (430 desa/kelurahan), 3.768 RW dan 14.951 RT. Terdapat 2 (dua) desa yang merupakan hasil pemekaran tahun 2010, yaitu Desa Gunung Mulya hasil pemekaran dari Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis hasil pemekaran dari Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung.

Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola penggunaan tanah hasil interpretasi Alos tahun 2010, dikelompokkan menjadi kawasan non terbangun,

kawasan terbangun dan penggunaan lahan lain-lain. Kawasan non terbangun mencakup 88,03% dari total luas wilayah, dan terdiri dari hutan (14,32%), sawah (11,74%), kebun campuran (21,35%), ladang/tegalan/perkebunan/padang rumput/ilalang (23,25%), dan semak belukar (17,37%). Kawasan terbangun mencakup 11,08% dari total luas wilayah, dan terdiri dari permukiman, kawasan pertambangan/galian serta kawasan dan zona industri. Penggunaan lahan lain-lain mencakup 0,89% dari total luas wilayah, dan terdiri dari sungai/badan air/danau/waduk/situ (0,85%), rawa (0,03%) dan tambak/empang (0,01%).

Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain latosol, aluvial, regosol, podsolik dan andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Secara topografi, dataran yang relatif rendah di bagian Utara hingga dataran tinggi di bagian Selatan yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut, 42,62% pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut, 19,53% pada ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, 8,43% pada ketinggian 1.000-2.000 meter di atas permukaan laut dan 0,22% pada ketinggian 2.000-2.500 meter di atas permukaan laut.

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500-5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3)

DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) Sub DAS Kali Bekasi; (6) Sub DAS Cipamingkis; dan (7) DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata air.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2011 berdasarkan estimasi data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 4.922.205 jiwa (angka sementara) yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.510.325 jiwa dan penduduk perempuan 2.411.880 jiwa. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan bilamana dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2010 yang berjumlah 4.771.932 jiwa, atau meningkat sebanyak 150.273 orang. Kondisi ini menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 3,15 % pada tahun 2011. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Putri, Bojonggede, Cileungsi, dan Kecamatan Cibinong. Pertambahan penduduk di keempat kecamatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pola pertumbuhan wilayah kecamatan yang bersangkutan sebagai pusat pengembangan usaha industri dan permukiman, sehingga cukup berkembang beragam jenis usaha industri besar maupun sedang, yang menyebabkan tingginya migrasi masuk penduduk dari luar kecamatan sebagai tenaga kerja untuk bermukim di kecamatan setempat.

Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Bogor sebesar \pm 298.838,304 Ha yang didiami oleh 4.922.205 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1.647 orang/km². Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, *sex ratio* penduduk Kabupaten Bogor adalah sebesar 104, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki.

Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kondisi Demografi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk (jiwa)	4.505.679	4.643.186	4.771.932	4.922.205
2	Laju pertumbuhan penduduk (%)	3,08	3,05	3,15	3,15

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2012

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bogor selama periode tahun 2008-2011 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2011 relatif stabil bahkan mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak

ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi. Pada tahun 2011, PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku mencapai Rp.82,699 triliun, lebih tinggi dari nilai PDRB pada tahun 2010 sebesar Rp. 73,801 triliun atau meningkat 12,06 %, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 34,379 triliun, lebih tinggi dari tahun 2010 sebesar Rp. 32,526 triliun atau naik 5,70 %. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa nilai PDRB, baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi makro, kondisi ekonomi Kabupaten Bogor relatif meningkat, yang ditunjukkan oleh angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 berdasarkan harga konstan sebesar 5,70 %. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi tahun 2011 yang cukup rendah. Sebagaimana terlihat dari inflasi nasional sebesar 3,79 %, inflasi Jawa Barat sebesar 3,10 %, sedangkan tingkat inflasi di Bogor mencapai 2,85 %, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2010, yaitu sebesar 6,79 %. Hal ini dapat terlihat dari pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2008 - 2011.

Tabel 2.2. Nilai dan Kontribusi Sektor Usaha dalam PDRB 2008 - 2011

NO	SEKTOR USAHA	TAHUN (Rp. Juta)							
		2008		2009		2010		2011	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.		Rp.	%
A.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	58.389.411,43		66.083.788,55		73.800.700,55		82.699.458,37	
	Primer	3.367.726,88	5,77	3.704,823,94	5,61	4.126.719,61	5,59	4.387.942,89	5,31
	Sekunder	40.078.637,69	68,64	44,952,879,24	68,02	49.614.605,55	67,23	55.043.884,21	66,56
	Tersier	14.943.046,86	25,59	17,426,085,36	26,37	20.059.375,40	27,18	23.267.631,26	28,14
B.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	29.721.698,04		30.952.137,83		32.526.449,67		34.378.837,29	
	Primer	1.816.061,80	6,11	1.887.540,00	6,10	1.987.614,49	6,11	1.996.900,33	5,81
	Sekunder	20.601.560,12	69,31	21.220.240,40	68,56	22.178.636,16	68,19	23.378.341,44	68,00
	Tersier	7.304.076,12	24,57	7.844.357,43	25,34	8.360.199,02	25,70	9.003.595,52	26,19

Sumber : BPS Kabupaten Bogor , 2012

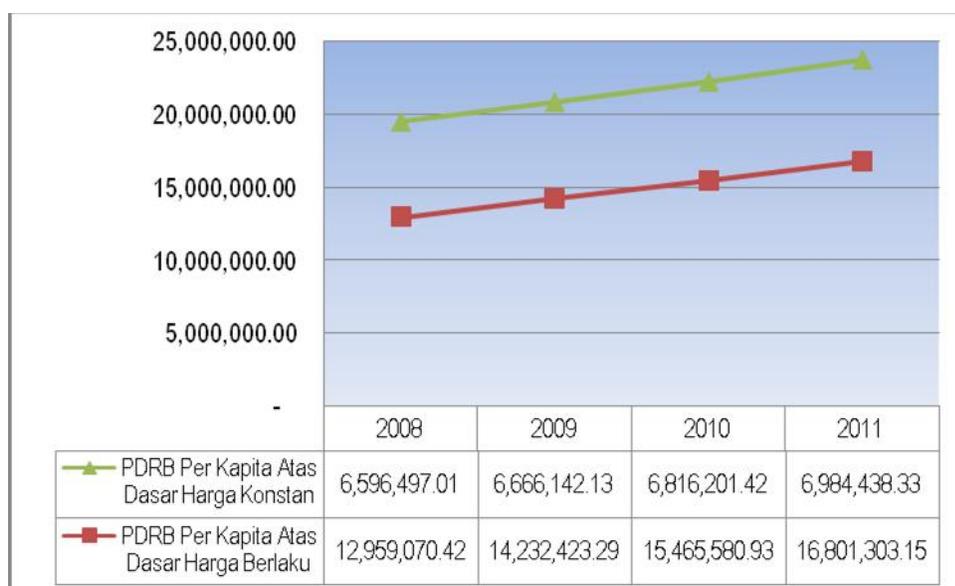
Berdasarkan tabel di atas, sektor usaha yang memiliki proporsi terbesar pada struktur perekonomian Kabupaten Bogor adalah sektor usaha sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor bangunan, yang mencapai 66,56 persen pada tahun 2011. Namun apabila memperhatikan perkembangan dari tahun 2008 – 2011, kontribusi sektor sekunder tersebut semakin menurun, yaitu 68,64% pada tahun 2008, 68,02% pada tahun 2009, 67,23% pada tahun 2010, dan 66,56% pada tahun

2011; sementara sektor tersier mulai bergerak naik dari 24,58% pada tahun 2008, 25,59% pada tahun 2009, 26,37% pada tahun 2010, dan 28,14% pada tahun 2011. Dengan demikian, lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa lainnya, mulai banyak diminati di Kabupaten Bogor. Pertumbuhan sektor-sektor usaha tersebut sangat berhubungan dengan realisasi investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor pada masing-masing kelompok lapangan usaha di tiap sektor. Pertumbuhan sektor sekunder dan tersier akan membuka peluang dalam menunjang sektor lain bergerak terutama sektor primer, khususnya kelompok lapangan usaha pertanian.

Sementara itu, berdasarkan angka PDRB berdasarkan harga konstan, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 tercatat sebesar 5,58%, kemudian turun pada tahun 2009 menjadi 4,14%, yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 5,09%, dan semakin meningkat pada tahun 2011 menjadi 5,70%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2009 akibat kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas, kenaikan BBM dan TDL, cenderung teratasi. Kendati demikian peningkatan-peningkatan tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena pada PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi.

Perbaikan kondisi ekonomi di Kabupaten Bogor dapat ditunjukkan dengan angka inflasi yang semakin berkurang, yaitu 6,79% pada tahun 2010 dan 2,85% pada tahun 2011.

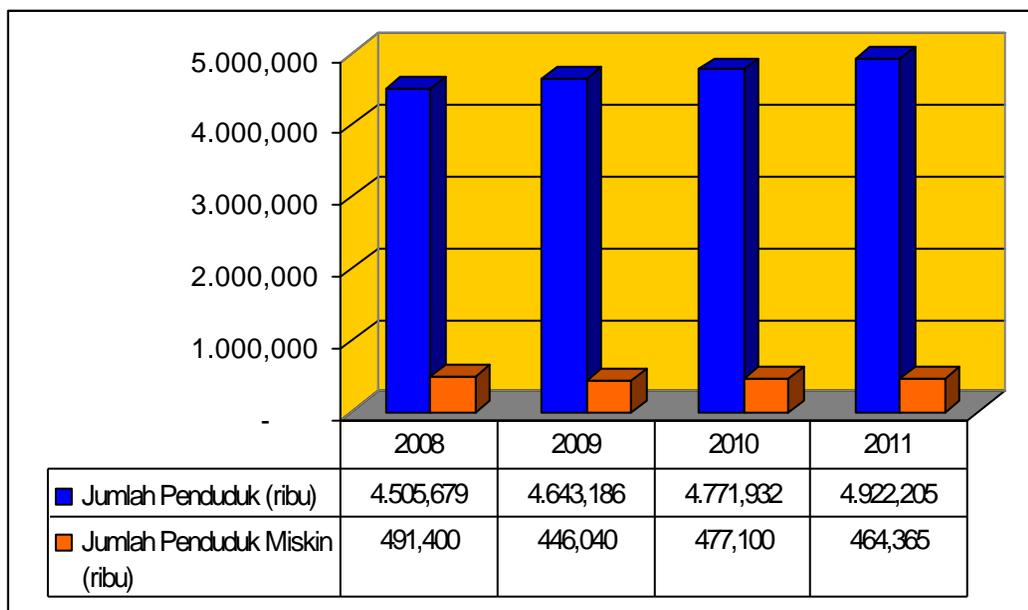
Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bogor maka pendapatan per kapita pun akan meningkat. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2008 sebesar Rp. 12.959.070,42, pada tahun 2009 sebesar Rp. 14.232.423,29, pada tahun 2010 sebesar Rp. 15.465.580,93, kemudian pada tahun 2011 semakin meningkat menjadi Rp. 16.801.303,15. Begitu pula pada PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 6.596.497,01, pada tahun 2009 sebesar Rp. 6.666.142,13, pada tahun 2010 menjadi Rp. 6.816.201,42 kemudian pada tahun 2011 menjadi Rp. 6.984.438,33.



Gambar 2.2. Grafik Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bogor Tahun 2008-2011

1) Kemiskinan

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bogor berjumlah 491,40 ribu jiwa kemudian menurun menjadi 446,04 ribu jiwa pada tahun 2009. Namun pada periode 2009-2010 secara jumlah terjadi kenaikan penduduk miskin, yaitu menjadi 477,10 ribu jiwa pada tahun 2010. Meskipun demikian, secara persentase terjadi penurunan jumlah penduduk, karena hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor yang masih tinggi yaitu sebesar 3,15% sehingga jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2010 sebanyak 4.771.932 jiwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk, baik sedikit ataupun banyak, akan menaikkan jumlah penduduk miskin. Penambahan penduduk dalam hal ini bersumber dari pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian) ataupun migrasi masuk ke kabupaten Bogor yang relatif tinggi. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 berjumlah 464,36 ribu jiwa, lebih rendah dari tahun 2010 yang berjumlah 477,10 ribu jiwa, berarti mengalami penurunan sebanyak 36.731 jiwa atau berkurang 0,55% dibandingkan dengan tahun 2010.



Gambar 2.3. Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tahun 2008-2011

2) Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*). Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Bogor telah mencapai angka 72,82. Selengkapnya IPM Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. IPM Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2011

NO	INDIKATOR	REALISASI			
		2008	2009	2010	2011*)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,66	71,35	72,16	72,82
	- Indeks Kesehatan	71,72	72,40	73,10	73,58
	- Indeks Pendidikan	78,39	79,15	81,08	82,26
	- Indeks Kemampuan Daya Beli	48,00	50,27	53,20	55,00
2	Komponen IPM:				
	- AHH	68,03	68,44	68,86	69,15
	- AMH	93,59	94,29	95,00	95,89
	- RLS	7,20	7,54	7,98	8,25
	- PPP	627,74	628,34	629,62	630,89

Keterangan : *) Angka Prediksi (Desember 2011)

B. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Bogor periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan.

AMH adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya). AMH tahun 2008 sebesar 93,59%, tahun 2009 sebesar 94,29%, tahun 2010 sebesar 95,02% dan tahun 2011 sebesar 95,89%. Kondisi ini disebabkan masih adanya individu atau warga Kabupaten Bogor yang belum bebas dari tiga buta yaitu buta pengetahuan dasar, buta bahasa Indonesia dan buta huruf latin sebesar 2,25% dari total penduduk yang berusia di atas 15 tahun.

RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan yang pernah dijalani. RLS Kabupaten Bogor tahun 2008 sebesar 7,20 tahun, tahun 2009 sebesar 7,54 tahun, tahun 2010 sebesar 7,98 tahun dan tahun 2011 sebesar 8,25 tahun. Realisasi RLS tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor yang berumur 15 tahun ke atas secara rata-rata lama pendidikannya telah mencapai setara dengan SMP kelas dua.

Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan di tahun 2010 menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 98,88% pada tingkat SD/MI/Paket A, 96,6% pada tingkat SMP/MTs/Paket B, dan 96,4% pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun

2011 APK SD/MI/Paket A mencapai 122,15%, SMP/MTs/Paket B 95,03% sedangkan SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 51,71%

Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM SD/MI/Paket A pada tahun 2011 sebesar 115,61%, SMP/MTs/Paket B 88,77%, SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 41,24%

2) Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, pelaksanaan program-program pembangunan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap angka kelangsungan hidup bayi yang terus meningkat, yaitu 61,86 pada tahun 2008, 64,01 pada tahun 2009, kemudian 66,04 pada tahun 2010. Sementara persentase balita gizi buruk pada tahun 2009 sempat meningkat tajam, dimana pada tahun 2008 terdapat 0,0207% (79 orang balita gizi buruk) dan pada akhir tahun 2009 bertambah menjadi 308 balita gizi buruk (0,0788%). Namun demikian, selama tahun 2010 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kembali status gizi balita, sehingga terjadi pengurangan jumlah balita gizi buruk menjadi 244 orang (0,0605%). Berbagai upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan terus dilakukan dan diharapkan akan dapat terus meningkatkan kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Bogor dan secara keseluruhan akan mempengaruhi angka usia harapan hidup Kabupaten Bogor, yang pada tahun 2011 telah mencapai 69,15 tahun.

3) Kepemilikan tanah

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bogor, persentase penduduk yang memiliki lahan bersertifikat relatif sangat rendah, bahkan peningkatan jumlah penduduk justru menambah kecil persentase kepemilikan lahannya, yang hanya mencapai angka 12,90% pada tahun 2011. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki masih sangat rendah.

4) Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, tahun 2008 sebesar 86,40%, tahun 2009 sebesar 88,76%, tahun 2010 sebesar 89,36% dan tahun 2011 sebesar 91,41%. Peningkatan angka kesempatan kerja tersebut menggambarkan bahwa penambahan angkatan kerja dapat diimbangi dengan pertumbuhan

lapangan kerja. Oleh karena itu, harus terus dilakukan upaya perluasan lapangan kerja sebagai upaya mengatasi pengangguran.

Berikut gambaran perkembangan kinerja pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2008 – 2011 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2008 – 2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN				
1	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	93,59	94,29	95,02	95,89
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,20	7,54	7,98	8,25
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	125.36%	127.37%	129.29%	122,15%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91.79%	93.29%	99.55%	95,03%
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	40.27%	41.47%	45.25%	51,71%
6	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	98.93%	99.15%	98.88%	-
7	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	95.98%	95.61%	96.60%	-
8	Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	97.88%	98.31%	96.40%	-
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	109.34%	108.51%	110.12%	115,61%
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79.14%	79.29%	82.83%	88,77%
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	33.29%	34.22%	36.08%	41,24%
II	KESEHATAN				
1	Angka kelangsungan hidup bayi	61.86	64.01	66.04	
2	Angka usia harapan hidup	67.68	68.44	68.48	69,15
3	Persentase balita gizi buruk	0.0207	0.0788	0.0605	0,041
III	PERTANAHAN				
1	Persentase penduduk yang memiliki lahan	7,80%	7,49%	7.73%	8,45%
IV	KETENAGAKERJAAN				
1	Rasio penduduk yang bekerja	86,40	88,76	89.36	91,41

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

C. Seni Budaya dan Olahraga

1) Kebudayaan

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Bogor selama tahun 2008-2011 menunjukkan peningkatan dari 90 buah menjadi 104 buah pada tahun 2011. Sedangkan gedung kesenian baru dimiliki pada tahun 2010. Dari kedua indikator tersebut, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor masih menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang responsif terhadap kesenian tradisional. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni.

2) Pemuda dan Olahraga

Jumlah klub olahraga selama tahun 2008 - 2011 mengalami penambahan, dan rasionya terhadap 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari 0,1023 pada tahun 2008 menjadi 0,1308 pada tahun 2011. Sementara kondisi sarana dan prasarana olahraga sedang diupayakan untuk terus bertambah sebagai salah satu upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sehingga pada tahun 2010 telah dibangun 2 unit gedung olahraga dan tahun 2011 dibangun lapangan sepakbola di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, yang dapat dimanfaatkan untuk memacu peningkatan prestasi atlet Kabupaten Bogor. Berikut gambaran perkembangan klub serta sarana dan prasarana olahraga sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5. Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2008 – 2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
I	KEBUDAYAAN				
1	Jumlah grup kesenian	90	96	104	104
2	Jumlah gedung	-	-	1	1
II	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Jumlah klub olahraga	44	44	59	64
2	Jumlah gedung olahraga	-	-	2	2
3	Rasio klub olahraga per 10.000 pdtk	0,1023	0,0983	0,1239	0,1308

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dan urusan pilihan. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama periode 2008-2011 adalah sebagai berikut :

A. Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama tahun 2008 -2011 mengalami perubahan fluktuatif, angka partisipasi sekolah SD/MI mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 1.112,02 menjadi 1.185,03 pada tahun 2011, angka partisipasi sekolah SMP/MTs mengalami peningkatan dari 855.51 pada tahun 2008 menjadi 903,77 pada tahun 2011. Pada pendidikan menengah, angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MK meningkat dari tahun 2008 sebesar 357,87 menjadi 429,38% pada tahun 2011. Peningkatan angka partisipasi sekolah ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terutama berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memperluas daya tampung, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, serta akses pendidikan ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar dari 39,36% pada tahun 2008 menjadi 42,33% tahun 2011, sementara pendidikan menengah dari 15,89% pada tahun 2008 menjadi 20,41% pada tahun 2011.

Angka kelulusan di seluruh tingkatan pendidikan sampai dengan tahun 2011 relatif sangat baik, yaitu 99,42% untuk SD/MI, 99,89% untuk SMP/MTs dan 99,96% untuk SMA/SMK/MA. Hal ini sangat ditunjang dengan peningkatan kualitas guru terutama dalam pemenuhan kualifikasi pendidikan formal S1/D-IV yaitu 33,75% pada tahun 2008 menjadi 57,71% pada tahun 2011. Namun yang perlu diperhatikan, angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sempat mengalami penurunan pada tahun 2010, yaitu dari 69,31% pada tahun 2008, 70,67% pada tahun 2009, menjadi 69,18% pada tahun 2010 tapi kondisi ini dapat ditingkatkan kembali menjadi 71,14% pada tahun 2011.

Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 17,63% pada tahun 2008 menjadi 25,49% pada tahun 2011.

Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan

juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Berikut gambaran perkembangan pelayanan urusan pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2008 – 2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Pendidikan Dasar				
	a. Angka Partisipasi Sekolah				
	- SD/MI	1.112,02	1.103,46	1.119,61	1.108,47
	- SMP/MTs	855,51	855,57	890,97	903,77
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah				
	- SD/MI				42,33
	- SMP/MTs				32,96
	c. Rasio guru/murid				
	- SD/MI	264,73	263,92	264,17	35,53
	- SMP/MTs	240,57	437,72	402,23	59,67
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata				
	- SD/MI	26,47	26,39	26,42	...
	- SMP/MTs	24,06	43,77	40,22	...
2.	Pendidikan Menengah				
	a. APS	357,87	364,06	383,48	385,18
	b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	15,89	15,36	17,07	20,41
	c. Rasio guru terhadap murid	348,04	279,98	270,61	57,31%
	d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	34,8	29,64	27,06	...
	e. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97,57	97,75	97,8	95,72
3.	Fasilitas Pendidikan				
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	64,06%	76,78%	81,90%	97,23%
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	87,96%	89,10%	92,08%	86,83%
4.	PAUD				
	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun x100%	17,63%	21,74%	24,22%
5.	Angka Putus Sekolah				
	a. SD/MI	2,33%	0,70%	0,27%	0,256%
	b. SMP/MTs	1,01%	0,46%	0,90%	0,885%
	c. SMA/SMK/MA	0,46%	0,31%	0,55%	0,536%
6.	Angka Kelulusan				
	a. Angka Kelulusan SD/MI	98,93%	99,15%	98,88%	99,42%
	b. Angka Kelulusan SMP/MTs	95,98%	95,61%	96,60%	99,89%
	c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	97,88%	98,31%	96,40%	99,96%
	d. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	78,87%	115,19%	91,23%	92,65%
	e. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	69,31%	70,67%	69,18%	71,14%
	f. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	33,75%	33,84%	46,79%	57,71%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

2) Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bogor, telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ke tahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan

masyarakat Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan rasio puskesmas, poliklinik, pusku per 1000 penduduk, rasio RS per 1000 satuan penduduk, rasio dokter persatuan penduduk, serta rasio tenaga medis per 1000 satuan penduduk, dari tahun 2008-2011 yang meningkat cakupannya. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan telah mencapai 100%, cakupan pelayanan Puskesmas dari tahun 2008-2011 tetap sebesar 252,5%, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin telah mencapai angka 100%.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD telah mencapai 100%, sementara TBC sudah menunjukkan peningkatan dari 78,75% pada tahun 2008 menjadi 81,31% pada tahun 2011. Selain itu, dalam rangka pencegahan penyakit menular, pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memberikan imunisasi bagi anaknya melalui program *UCI (Universal Child Immunization)* di desa/kelurahan, sehingga sampai dengan tahun 2011 cakupan desa/kelurahan UCI telah meningkat dari 71,08% menjadi 85,75%.

Berkaitan dengan perilaku hidup sehat, ditunjukkan dengan meningkatnya cakupan rumah bebas jentik serta cakupan SAB, jamban keluarga (JAGA), tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM yang memenuhi syarat). Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, pemerintah berupaya untuk melibatkan secara aktif masyarakat mulai dari tingkat desa melalui program Desa Siaga, yang terus bertambah, dari 43 desa pada tahun 2009 menjadi 128 desa pada tahun 2011.

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) ditunjukkan dengan meningkatnya cakupan kunjungan bayi dari 73,61% menjadi 92,25%, meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari 69,09% menjadi 99,52%, serta meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari 67,24% menjadi 80,38%.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan, di Kabupaten Bogor telah beroperasi 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu RSUD Cibinong, RSUD Ciawi dan RSUD Leuwiliang. Sampai dengan tahun 2011, berturut-turut Bed Occupancy Ratio (BOR) dari ketiga RSUD tersebut adalah 79,15%, 60,16% dan 78,87%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat, pada tahun 2010 RSUD Cibinong telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),

sementara RSUD Ciawi telah mendapatkan penetapan pada tahun 2010 dan sudah beroperasi sebagai PPK-BLUD pada tahun 2011.

Berikut gambaran perkembangan pelayanan umum urusan kesehatan selama tahun 2008-2011 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.7. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
I	DINAS KESEHATAN				
1.	Rasio posyandu per satuan balita	10,67	10,89	11,01
2.	Rasio puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk	1 : 8.872	1 : 9.565	1 : 9.964	1:9.882
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 307.355	1 : 310.091	1 : 340.229	1: 264.623
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 5.241	1 : 5.362	1 : 4.451	1:2.349
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 3.947	1 : 4.026	1 : 3.989	1:2.277
6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	69,09	70	72,5	99,52
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	67,24	85	86,25	80,38
8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	71,08	77,08	81,07	85,75
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	78,75	76,12	80,73	81,31
11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
13.	Cakupan kunjungan bayi	73,61	87,87	90	92,25
14.	Cakupan puskesmas	252,5	252,5	252,5	252,5
15.	Cakupan pembantu puskesmas	20,09	22,43	24,77	25,70
16.	Cakupan Rumah dengan bebas jentik	86,22	91,3	92,3	93,05
17.	Cakupan TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat	44,73	72,7	74,85	75,94
18.	Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat	58,03	70,7	87,08	88,07
19.	Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat	56,5	38,5	68,77	69,80
20.	Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat	40,84	30,8	66,19	67,70
21.	Prosentase Sarana Kesehatan Swasta yang berijin	100	100	100	103,11
22.	Prosentase pengadaan obat esensial	100	100	100	100
23.	Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya	41,07	41,07	42,6	43,51
24.	Cakupan Desa Siaga Aktif	-	43	85	128

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

1	2	3	4	5	6
II	RSUD CIBINONG				
1.	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)	80,25%	82,41%	82,57%	79,15%
2.	Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	38,00%	38,00%	38,00%	38%
3.	Peningkatan layanan Spesialis	16	16	16	16
4.	Peningkatan jumlah instalasi	12	12	12	13
5.	Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	1 : 3,2	1:3,2	1:2,8	1 : 3,4,
6.	Rasio Perawat per Tempat Tidur	1 : 0,72	1 : 0,72	1 : 0,73	1 : 0,79
III	RSUD CIAM				
1.	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)	60,00%	53,20%	59,43%	60,16%
2.	Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	42,53%	44,66%	64,29%	46,61%
3.	Peningkatan layanan Spesialis	13	13	13	16
4.	Peningkatan jumlah instalasi	11	12	14	14
5.	Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	1 : 2,8	1:03	1:03	1 : 3.5
6.	Rasio Perawat per Tempat Tidur	1 : 0,6	1:0,7	1:0,7	1 : 0.73
IV	RSUD LEUMLIANG				
1.	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)	-	-	51,46%	78,87%
2.	Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	-	-	60%	65%
3.	Peningkatan layanan Spesialis	-	-	8	6
4.	Peningkatan jumlah instalasi	-	-	10	10
5.	Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	-	-	-	0,625
6.	Rasio Perawat per Tempat Tidur	-	-	-	1:10

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

3) Pekerjaan Umum

Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan selama tahun 2008-2011 menunjukkan peningkatan, panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2008 sebesar 66,15%, tahun 2009 sebesar 74,62%, tahun 2010 sebesar 78,99% dan tahun 2011 sebesar 81,10%. Peningkatan kondisi jalan ini sangat mempengaruhi kemudahan arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Bogor. Dengan demikian, diharapkan kondisi infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian. Namun demikian, hal ini akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan fungsi trotoar dan drainase jalan tersebut.

Sementara itu berkaitan dengan irigasi, penanganan yang selama ini dilakukan telah menunjukkan peningkatan, yaitu dari 47,60% menjadi 58,13% luas irigasi dalam kondisi baik.

Berkaitan dengan infrastruktur, penyediaan air bersih, serta tempat pembuangan sampah, telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Cakupan sarana air bersih telah mencapai sebesar 69,80%; cakupan penanganan sampah telah mencapai 28,80% dari luas wilayah perkotaan. Semakin besar volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA, antara lain dengan implementasi pola 3R (*reuse, reduce, recycle*).

Sampai dengan tahun 2011, belum dilakukan penambahan luasan tempat pemakaman umum sehingga rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk justru turun karena adanya penambahan jumlah penduduk.

Berikut gambaran pelayanan umum urusan pekerjaan umum sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.8. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,6615	0,7462	0,7899	0,8110
2.	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	4,179	4,35
3.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,00041	0,00039	0,00037	0,00036
4.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui oleh roda 4)	100	100	100	100
5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	66,15%	74,62%	78,99%	81,10%
6.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	20,66%
7.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-	-	3,09%
8.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-	-	4,50%
9.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	38,81%
10.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	-	-	80,00%	0,209
11.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	47,60%	52,89%	55,53%
12.	Rumah tangga pengguna air bersih	45,70%	43,92%	44,24%	44,01%
13.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,3	0,28	0,27	25,91%
14.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,2033	0,1954	0,1942	20,00%
15.	Persentase penanganan sampah	22,86%	28,33%	31,92%	28,80%
16.	Persentase Penduduk berakses air minum	45,70%	43,92%	44,24%	
17.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	20,33%	19,54%	19,42%	20,00%
18.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	58,00%	58,00%	73,25%	44,01%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

4) Perumahan

Kondisi perumahan di Kabupaten Bogor ditunjukkan dengan semakin bertambahnya rumah layak huni sehingga mencapai 97,71% dari jumlah rumah di Kabupaten Bogor. Namun di lain pihak, adanya penambahan luas lingkungan permukiman kumuh dari 15.867.441 m² pada tahun 2008 menjadi 15.977.901 m² pada tahun 2010, harus mendapat penanganan serius karena dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan. Peningkatan luas kawasan kumuh antara lain disebabkan oleh meningkatnya migrasi penduduk yang tidak berkecakupan dari daerah/kota lain ke Kabupaten Bogor.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman antara lain kondisi sanitasi, yang sampai dengan tahun 2011 baru 23,83% persen rumah tinggal yang memiliki sanitasi.

Berikut gambaran pelayanan umum urusan perumahan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.9. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	N/A	N/A	10.28%	23.83%
2.	Rasio rumah layak huni	0.21	0.20	0.19	0.19
3.	Rasio permukiman layak huni	0.86	0.86	0.86	0.87
4.	Lingkungan Pemukiman	0.64	0.64	0.63	0.63
5.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.49	0.52	0.56	0.58
6.	Persentase luas permukiman yang tertata	85.66%	85.66%	85.77%	86.93%
7.	Rumah tangga ber-Sanitasi	N/A	N/A	10.28%	23.83%
8.	Lingkungan permukiman kumuh	0.5310%	0.5321%	0.5347%	0.54%
9.	Rumah layak huni	97.54%	97.58%	97.71%	97.87%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

5) Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan penataan ruang tahun 2008-2011 dilihat dari rasio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun yang menunjukkan peningkatan dari 12,65% pada tahun 2008 menjadi 24,36% pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta semakin membaiknya pelayanan penyediaan ruang publik yang diberikan pemerintah daerah. Berikut gambaran perkembangan pembangunan

pelayanan umum urusan penataan ruang selama periode 2008-2011 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	12,65%	14,54%	22,52%	24,36%
2.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0,02%	0,12%	0,08%	0,06 %

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

6) Perencanaan Pembangunan

Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 2008-2011 adalah tersedianya RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 tahun 2008, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2009 dan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD disusun sebagai penjabaran tahun berkenaan dalam RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya. Berikut gambaran kinerja perencanaan pembangunan daerah selama tahun 2008 – 2011 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.11. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

7) Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan perhubungan di Kabupaten Bogor selama periode 2008-2011 dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama empat tahun yang berfluktuasi dari 3.141.171 penumpang tahun 2008, naik menjadi 4.085.533 penumpang pada tahun 2009, kemudian turun menjadi 3.998.714 penumpang pada tahun 2010 dan semakin menurun pada tahun 2011 menjadi 3.908.886 penumpang. Fluktuasi jumlah penumpang lebih disebabkan adanya pergeseran penggunaan moda angkutan antara angkutan umum dengan angkutan pribadi.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi. Sedangkan jumlah terminal pada tahun 2011 berjumlah 5 buah terminal.

Tabel 2.12. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.141.171	4.085.533	3.998.714	3.908.886
2.	Rasio ijin trayek	0,000279	0,00027	0,000256	0,000254
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	17.952	18.002	18.052	18.756
4.	Jumlah Terminal	4	5	5	5
5.	Angkutan darat	0,50%	0,53%	0,56%	0,574 %
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	29,41%	29,53%	41,32%	47,11%
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	10	10	10	10
8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum per kendaraan	75.000	75.000	75.000	75.000
9.	Pemasangan Rambu-rambu	2,05%	2,05%	0,56%	0,45 %

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

8) Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor selama periode 2008-2011 diukur dari semakin luasnya kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau status mutu airnya, yaitu dari 10% pada tahun 2008 menjadi 60,59% tahun 2011.

Dalam rangka mencegah terjadinya longsor dan kerusakan sumber mata air telah dilakukan penghijauan, yang cakupannya semakin meningkat, yaitu dari 10% wilayah rawan longsor dan sumber mata air pada tahun 2008 menjadi 20% pada tahun 2010.

Sementara berkaitan dengan kewajiban para pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dilakukan pengawasan, yang

cakupannya meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 35% pada tahun 2008 menjadi 55,05% pada tahun 2010.

Sejak tahun 2009, BLH Kabupaten Bogor telah secara aktif berupaya untuk menegakkan hukum lingkungan, dengan memfasilitasi penyelesaian kasus lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Efektivitas penegakan hukum lingkungan telah meningkat dari 37,5% pada tahun 2009 menjadi 81,82% pada tahun 2011.

Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Pemantauan status mutu air	10,00%	20,34%	41,53%	60,59 %
2.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	10,00%	15,00%	20,00%	...
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	35,00%	35,86%	49,66%	55,05 %
4.	Penegakan hukum lingkungan	N/A	37,50%	90,48%	81,82%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

9) Pertanahan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan selama periode 2009-2011 diukur dari meningkatnya persentase luas lahan bersertifikat. Pada tahun 2009 persentase luas lahan bersertifikat yang ditangani mencapai 11,94%, sementara yang ditangani pada tahun 2010 mencapai 11,93%. Dan pada tahun 2011 mencapai 12.90 %. Jumlah penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2009 sebanyak 1 dari 9 kasus , tahun 2010 sebanyak 7 dari 11 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 7 dari 12 kasus. Antisipasi permasalahan ke depan adalah layanan fasilitasi konflik pertanahan berkaitan dengan pelayanan tertib administrasi di tingkat desa/kelurahan.

Tabel 2.13. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	N/A	11.94	11.93	12.90
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	N/A	11.11%	63.64%	58.33

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil selama tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Rasio penduduk ber -KTP per satuan penduduk	0.51	0.071	0.071	0,068
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0.95	0.79	0.79	0,84
3.	Rasio pasangan berakte nikah	1.00	1.00	1.00	0,89
4.	Kepemilikan KTP	95.70%	76.01%	76.01%	70,17%
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	212.79	234.89	227.13	247,09
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	sudah	sudah	sudah
8.	Jumlah penduduk (jiwa)	4,302,974	4,477,296	4,763,209	4.927.962
9.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1.53%	4.05	6.39	3,27%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2008 sebesar 0,51 justru mengalami penurunan menjadi 0,071 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 0,068. Rasio pasangan berakte nikah sebesar 1% turun menjadi 0.89%. Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2008 sebesar 0,95 menurun menjadi 0,79 pada tahun 2010 dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 0,84. Kepemilikan KTP tahun 2008 sebesar 95,7% menurun menjadi 76,01% pada tahun 2010 dan kembali menurun di tahun 2011 menjadi 70,17. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk tahun 2008 sebesar 212,79 meningkat menjadi 227,13 pada tahun 2010 dan 247,09 pada tahun 2011.

Kinerja kependudukan dan catatan sipil yang telah diuraikan di atas sangat dipengaruhi oleh kesadaran penduduk serta kemudahan akses dan keringanan biaya pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, untuk menghindari dokumen administrasi kependudukan ganda dengan cara mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Bogor. Hal ini akan sejalan dengan penerapan KTP Nasional berbasis NIK, yang dilanjutkan dengan rencana penerapan e-KTP. Penanganan administrasi kependudukan secara tepat merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor yang mencapai 3,27% pada tahun 2011.

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	16	16	16	16
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	44,40%	44,40%	44,40%	44,50%
3.	Rasio KDRT	55,00%	55,00%	55,00%	0,009%
4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	52,00%	52,00%	50,00%	0,48%
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	37,72	38,25	38,78	50%
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	23,53	23,53	23,53	28,41%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perempuan mulai aktif berpartisipasi, terutama dalam lembaga pemerintah ataupun swasta, bahkan partisipasi angkatan kerja perempuan secara keseluruhan terus meningkat, yaitu dari 37,72% pada tahun 2008 menjadi 38,78% pada tahun 2010 dan 50% pada tahun 2011.

Berkaitan dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang rasio kejadiannya mencapai 55% dan pekerja di bawah umur yang masih mencapai 50%, telah dibentuk P2TP2A Kabupaten Bogor yang memfasilitasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, dengan efektivitas penanganan sampai dengan tahun 2010 mencapai 23,53%.

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,19	2,07	2	1,80
2.	Rasio akseptor KB	0,00645	0,6887	0,7234	0,7366
3.	Cakupan peserta KB aktif	64,50%	68,87	72,34	73,66
4.	Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I	48,37	46,89	45,77	44,5%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang cukup baik, terlihat dari indikator jumlah anak per keluarga yang semakin menurun dari 2,19 menjadi 1,80 dalam empat tahun terakhir artinya jumlah anak dalam setiap keluarga terdiri dari 2 anak. Sementara akseptor KB ataupun peserta aktif mengalami peningkatan dari 64,50% pada tahun 2008 menjadi 73,66% pada tahun 2011. Hal ini memberikan pengaruh yang positif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga akan semakin rendah juga jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, yaitu 48,37% pada tahun 2008 menjadi 44,5% pada tahun 2010. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh terutama dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, pendidikan, *parenting (beyond family planning)* dan menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruan tinggi. Permasalahan ke depan yang harus ditangani secara serius adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana agar mampu menekan laju pertumbuhan penduduk.

13) Sosial

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	114 buah	114 buah	131 buah	154 buah
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	0,16	0,16	0,21	0,07
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,16	0,16	0,21	0,07

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Pembangunan pelayanan sosial di Kabupaten bogor selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Sarana sosial yang semula berjumlah 114 di tahun 2008 meningkat menjadi 154 di tahun 2011 dan saat ini terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada pada tahun 2011 sudah ditangani sebanyak 209 dari 293.050 kasus. Namun demikian hasilnya belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, di samping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

14) Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	63.01	62.99	59.60	62,72
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	135 kasus	85 kasus	125 kasus	186 kasus
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	38,42	55,61	59,16	62,72%
4.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	29.63	14.10	67.76	59,99%
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	13,60	11,24	11,11	8,59
6.	Keselamatan dan perlindungan (%)	6.82	1.76	1.37	...
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bogor pada 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2008 berjumlah 63,01 menjadi 59,60 di tahun 2010 dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 62,72. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak seiring dengan peningkatan angkatan kerja, atau komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas di atas usia kerja (>64 tahun) relatif besar.

Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008, dari 13,61%, menjadi 8,59% pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menurunkan

jumlah pengangguran telah menunjukkan hasil yang memadai, baik yang dilakukan dengan cara mengundang investor, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan para pekerja maupun upaya lainnya melalui kemudahan untuk membuka usaha baru dan wirausaha mandiri di sektor formal maupun informal. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan, dimana pada tahun 2008 baru mencapai 29,63%, dan menjadi 59,99% pada tahun 2011.

Namun demikian, untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, konflik antara buruh dan pengusaha harus dapat terselesaikan dengan baik sehingga kasus sengketa pengusaha-pekerja dapat diatasi dan jumlah kasusnya dapat dihindari dari tahun ke tahun. Ke depan, upaya fasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan terus ditingkatkan termasuk rencana fasilitasi hubungan industrial yang bisa memberikan solusi saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis serta peningkatan upaya pemberian jaminan keselamatan dan perlindungan kepada pekerja.

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.19. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Persentase koperasi aktif	74.85%	64.82%	59.23%	64,61%
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	4500	7500	8700	10000
3.	Jumlah BPR/LKM (termasuk PDPK dan LPK milik pemerintah)	19	19	19	19
4.	Usaha Mikro dan Kecil	44.44%	64.64%	86.21%	106,95%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Bogor mengalami penurunan dari 74,85% pada tahun 2008 menjadi 64,61% pada tahun 2011.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 4.500 unit pada tahun 2008, 7.500 unit pada tahun 2009, 8.700 unit pada tahun 2010 dan 10.000 unit pada tahun 2011. Demikian juga dengan perkembangan usaha mikro dan kecil, yang mencapai 106,95% pada tahun 2011. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat

terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal-hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana-rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat sehingga menjadi aktif kembali dan juga sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

16) Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	375	414	491	561
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	11,349,431,601,937	15,697,263,283,533	18,488,516,412,869	22,602,123,331,871
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	N/A	53,36	55,58	55,58
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	N/A	18,65%	18,86%	18,86%
5.	Penyelesaian izin lokasi	N/A	74,36	75	75
6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	1 website	1 website	1 website	1 website
7.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Pameran/expo	1	2	3	3

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Jumlah investor dan investasi selama tahun 2008-2010 telah mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya layanan perizinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan di samping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja. Upaya peningkatan investasi ke depan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah guna memacu pertumbuhan investasi.

Dengan demikian Kabupaten Bogor diharapkan akan lebih mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupun luar negeri.

17) Kebudayaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.21. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	15	42	99
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	5	17
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A	18,18%	24,24%	90%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2008 sampai 2011 terus mengalami peningkatan, dari 8 kegiatan, 15 kegiatan, 42 kegiatan, sampai 99 kegiatan pada tahun 2011 dalam rangka mendukung promosi Visit Kabupaten Bogor Tahun 2011.

Sebagai penunjang, Kabupaten Bogor telah memiliki sarana penyelenggaraan seni dan budaya, yaitu 5 sarana sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 menjadi 17. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 33 buah, dan yang dilestarikan pada tahun 2011 sebanyak 30 dan akan terus diupayakan peningkatannya.

Tantangan ke depan diperlukan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa mempromosikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu tujuan wisata dari potensi seni dan budaya yang dimiliki, tidak lagi hanya sebagai tempat singgah sementara. Selain itu perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan kesenian juga diperlukan dalam mendukung bentuk promosi tersebut. Sedangkan pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri Kabupaten Bogor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

18) Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.21. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah organisasi pemuda	47	47	50	53
2.	Jumlah organisasi olahraga	44	44	59	64
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	7	14
4.	Jumlah kegiatan olahraga	6	6	15	15
5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	2 GOM	2 GOM
6.	Lapangan olahraga	1 buah	1 buah	1 buah	2 buah

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Dari tabel tersebut diatas, menggambarkan penyelenggaraan pembangunan pemuda dan olahraga selama empat tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan olahraga juga mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2011. Jumlah organisasi pemuda dari 47 di tahun 2008 menjadi 53 di tahun 2011. Untuk jumlah kegiatan kepemudaan dan kegiatan olahraga masing-masing meningkat dari 3 kegiatan menjadi 14 kegiatan kepemudaan dan dari 6 kegiatan menjadi 15 kegiatan olahraga pada tahun 2011. Namun dilihat dari sarana olahraga, rasio sarana dan prasarana olahraga relatif sangat minim, terlebih apabila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan ke depan berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dengan standar nasional saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Bogor, minimal tersedia 1 (satu) sarana di masing-masing kecamatan.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Keberhasilan pembangunan demokrasi telah berhasil memantapkan peran masyarakat terutama dari sisi kemandirian organisasi baik LSM, Ormas maupun OKP. Pelayanan urusan kesatuan dan politik dalam negeri tersebut menggambarkan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat saling bahu membahu dalam penyelenggaraan pembangunan. Tantangan ke depan adalah untuk membangun sinergitas di antara seluruh kekuatan LSM, Ormas dan OKP yang ada untuk bersama-sama membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Selain pembinaan LSM, ormas dan OKP, kinerja pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah berkaitan dengan upaya untuk

mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman, melalui pelaksanaan penertiban pada kegiatan/usaha yang melanggar Perda.

Untuk mendukung hal tersebut rasio Polisi Pamong Praja, Linmas maupun pos kamling harus mendapat perhatian untuk selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun demikian, ke depan dipertukan pelayanan yang tidak mengedepankan aspek represif tetapi lebih ke tindakan preventif. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Kegiatan pembinaan politik daerah	3	4	3	3
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0	1	1	2
3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	9.95	9.56	8.99	8,72
4	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	9.95%	9.56%	8.99%	8,72
5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0.62	0.54	0.53	0,50
6	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	33.65	34.93	35.34	35.74
7	Penegakan PERDA	23.39	10.67	12.93	11.31
8	Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin	41.67	20.83	13.33	20 PETI
9	Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar	0.02719	0.1386	0.0237	25 unit
10	Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara	31.94	6.47	18.71	50 unit
11	Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin	-	-	-	-
12	Penertiban Reklame/Spanduk	64.13	21.44	30.43	150 spanduk
13	Penertiban Usaha Peternakan	22.67	16.67	8	25 unit
14	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	18.33	18.33	18.33	11 titik
15	Penertiban Warung Remang-remang/PSK	12.12	12.12	12.12	8 titik
16	Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan	19.64	0	15.45	100 orang
17	Cakupan patroli petugas Satpol PP	730	365	730	730
18	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	23.39	10.67	12.93	11.31
19	Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin	41.67	20.83	13.33	20 PETI
20	Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar	0.02719	0.1386	0.0237	25 unit
21	Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara	31.94	6.47	18.71	50 unit
22	Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin	-	-	-	-
23	Penertiban Reklame/Spanduk	64.13	21.44	30.43	150 spanduk
24	Penertiban Usaha Peternakan	22.67	16.67	8	25 unit
25	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	18.33	18.33	18.33	11 titik
26	Penertiban Warung Remang-remang/PSK	12.12	12.12	12.12	8 titik
27	Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan	19.64	0	15.45	100 orang
28	Angka kriminalitas	9.15	10.57	9.59	8,42
29	Angka kriminalitas yang tertangani	9.15	10.57	9.59	8,4
30	Jumlah demo	83	64	83	11

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.23. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Pertumbuhan ekonomi	5.58%	4.14%	5.09%	5,70%
2	Kemiskinan (%)	12.11	10.81	9.39	9,42
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0.00016268	0.000156344	0.00014696	0,000183873
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMIK)	65.06%	77.45%	74.10%	88,89%
5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	70.00	74.00	78.00	...
6	Jumlah LHA berkala	N/A	73	180	276
7	Tindak Lanjut Hasil audit berkala OPD	100	100	100	99,94%
8	Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	1	1	
9	Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS	N/A	75.00	89.00	100,00
10	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui bintek, diklat dan tugas belajar	N/A	99.56	88.95	99,73
11	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1.046	1.304	2.595	2,6

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Tabel di atas, menggambarkan bahwa kondisi aspek pelayanan umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian telah menunjukkan perkembangan yang positif, antara lain dengan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Kesiapsiagaan pemerintah dalam penanggulangan bencana, melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditunjukkan dengan penanganan kejadian bencana dan tingkat waktu tanggap yang terus meningkat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, telah dilakukan peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan pengawasan terhadap kinerja aparatur.

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rasio dari 1,046 pada tahun 2008 menjadi 2,6 pada tahun 2011.

21) Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan pangan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.24. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama	67.60	68.44	69.20	66,02%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Kabupaten Bogor telah memiliki regulasi tentang ketahanan pangan, yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, yang salah satu fokus kebijakannya adalah Peningkatan Ketahanan Pangan.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008-2010 ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata per tahunnya adalah 0,8%. Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan ketersediaan pangan utama, sehingga langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, pengendalian hama penyakit, perbaikan irigasi dan pengurangan tingkat kehilangan hasil.

Penurunan ini walaupun dilihat dari ketersediaan pangan utama menunjukkan peningkatan yang positif, tetap diperlukan antisipasi ke depan untuk membudayakan penganekaragaman makanan sebagai upaya substitusi dari pangan utama.

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pelayanan umum dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari kinerja LPM, PKK, Posyandu, LSM, serta kelompok binaannya. Jumlah PKK aktif dan posyandu aktif sampai dengan tahun 2011

telah menunjukkan kinerja optimal, yaitu sampai dengan 100% dari PKK dan posyandu yang ada seluruhnya aktif. Jumlah kelompok binaan yang dibentuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa mengalami peningkatan.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 juga telah mencapai 100%. Jumlah LPM berprestasi diharapkan terus meningkat dikarenakan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan terus dioptimalkan.

Namun demikian, perlu mendapatkan perhatian serius terutama berkaitan dengan dukungan Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang justru mengalami penurunan.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Bogor selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	69.43	64.40	77.35	91,74
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	101.32	103.64	121.28	113,79
3	Jumlah LSM (lembaga)	N/A	35	93	93
4	LPM Berprestasi (lembaga)	6	6	6	6
5	PKK aktif	100.00%	100.00%	100.00%	100%
6	Posyandu aktif	99.90	99.90	100.00%	100%
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	68.55%	21.88%	34.77%	34,81
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100.00%	100.00%	100.00%	100%
9	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	17.76	16.36	9.11	1,40

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

23) Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Statistik Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Dari tabel urusan statistik diatas menggambarkan bahwa dokumen-dokumen yang tersedia dari tahun ke tahun tetap ada. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

24) Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Pengelolaan arsip secara baku	79%	79.78%	83.15%	86,52%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa tata kelola kearsipan semakin meningkat baik dilihat dari pengelola kearsipan. Selaras dengan perkembangan teknologi, pengelolaan arsip harus dapat mengantisipasi arsip berwujud digital, sehingga dapat diakses secara *online* oleh masyarakat yang lebih luas.

25) Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten bogor selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah jaringan komunikasi	0.02	0.02	0.01	0,03
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.17	0.12	0.11	0,11
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	145	145	145	145
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	21	30	30	30
5	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1
6	Sistim Informasi Manajemen Pemda	1 website	1 website	1 website	1 website

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa jaringan komunikasi, penyiaran radio/TV lokal, website milik Pemerintah Kabupaten Bogor semakin meningkat. Kinerja ini ditujukan untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program

dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bogor. Harapan ke depan perlu ditingkatkan kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

26) Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah perpustakaan	125	134	166	175
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0.26%	0.26%	0.39%	0,34%
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25.19%	28.17%	27.69%	27,3%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa jumlah perpustakaan dari tahun ke tahun meningkat. Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca, jumlah pengunjung di perpustakaan meningkat dari 0,26% per tahun pada tahun 2008 menjadi 0,34% per tahun pada tahun 2011. Peningkatan kunjungan tersebut diimbangi dengan peningkatan layanan penyediaan buku yang diharapkan dapat memenuhi minat bacaan yang diinginkan oleh masyarakat. Ke depan perpustakaan akan dikembangkan dengan penerapan teknologi informasi sesuai tuntutan masyarakat.

B. Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.30. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanian Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				
	a. Padi sawah	59,07	61,46	61,90	62,31
	b. Padi gogo	28,07	28,50	31,59	29,93
2	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku	4,56	4,40	4,36	4,10
3	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan	5,00	5,00	5,00	4,69
4	Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makanan) terhadap PDRB harga berlaku	0,03	0,02	0,02	0,02
5	Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makan) terhadap PDRB harga konstan	0,03	0,03	0,03	0,02
6	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga berlaku	0,42	0,41	0,40	0,37
7	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga konstan	0,46	0,46	0,46	0,44
8	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga berlaku=padi/bhn pangan utama lokal	0,03	0,02	0,02	0,02
9	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga konstan=padi/bhn pangan utama lokal	0,03	0,03	0,03	0,02
10	Cakupan Bina Wlayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	45,33	59,11	55,14	48,13
11	Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)				
	- Kelompok Pemula	N/A	35,74	33,65	33,63
	- Kelompok Lanjut	N/A	53,22	54,09	52,10
	- Kelompok Madya	N/A	10,37	11,43	13,21
	- Kelompok Utama	N/A	0,66	0,84	1,05
12	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	N/A	N/A	8,75	17,62

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Produktivitas padi, khususnya padi sawah, mengalami peningkatan. Sedangkan padi gogo mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010. Padi sawah, yang pada tahun 2008 memiliki produktivitas 59,07 ton per hektar, meningkat sampai dengan 62,31 ton per hektar pada tahun 2011, sementara padi gogo, produktivitasnya pada tahun 2008 adalah 28,07 ton per hektar dan meningkat menjadi 31,59 ton per hektar pada tahun 2010, namun pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan menjadi 29,93 ton per hektar.

Namun demikian, kontribusi sektor pertanian baik pertanian/perkebunan, palawija, tanaman keras dan produksi kelompok tani terhadap PDRB selama kurun waktu 4 tahun terakhir relatif mengalami penurunan. Hal tersebut diindikasikan sebagai akibat dari perubahan fungsi lahan pertanian. Upaya untuk terus mempertahankan budi daya pertanian dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaan kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani

yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari tahun 2011 sebanyak 17,62% dari total kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. Diharapkan program bina kelompok petani akan terus ditingkatkan dalam upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap PDRB.

2) Kehutanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.31. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kehutanan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	15.36%	15.36%	6.42%	4,24%
2	Kerusakan Kawasan Hutan	6.41%	6.41%	27.30%	22,96%
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	0.001	0.012	0.011	0,011
4	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan	0.396	0.404	0.408	0,412
5	Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	19.38	16.88	15.63	14,38
6	Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)				
	- Kelompok Pemula	N/A	35.66	35.57	32,18
	- Kelompok Lanjut	N/A	53.49	51.01	49,43
	- Kelompok Madya	N/A	10.85	13.42	17,82
	- Kelompok Utama	N/A	N/A	N/A	0,57
7	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	N/A	N/A	33.56	22,99

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Pembangunan urusan kehutanan dilaksanakan melalui upaya-upaya memperbaiki kerusakan lahan dan mengembalikan fungsi asalnya melalui **rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Sampai dengan tahun 2010 total lahan kritis di Kabupaten Bogor yang telah tertangani seluas 2,37 hektar.** Namun demikian, ternyata luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan justru semakin bertambah. Oleh karena itu pembangunan urusan kehutanan harus tetap diarahkan pada peningkatan dan pengelolaan sumber daya alam/hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai media pengatur tata air dan kelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas kelompok tani yang berperan dalam pengelolaan hutan. Sejalan dengan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan hutan, terutama hutan rakyat, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB relatif kecil.

3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.32. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Pertambangan tanpa ijin	100.00%	100.00%	100.00%	100%
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku	1.21%	1.21%	1.23%	1,24%
3	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan	1.11%	1.10%	1.11%	1,1%
4	Rasio ketersediaan daya listrik	80.22%	80.62%	81.05%	0,43%
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	80.22%	80.62%	81.05%	0,43%
6	Rumah tangga pengguna listrik	869.348	873.718	878.434	883.354

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Selama tahun 2008–2011, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berhasil menertibkan seluruh kegiatan pertambangan liar yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor.

Keberadaan potensi bahan galian, baik golongan B, maupun golongan C di Kabupaten Bogor sebagai salah satu potensi ekonomi masih sangat diandalkan. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku dari tahun 2008 hingga tahun 2011 yang terus mengalami peningkatan.

4) Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut..

Tabel 2.33. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Kunjungan wisata	2,230,010	2,361,155	2,597,385	4.230.475
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2.94%	2.93%	2.98%	513.367.643
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan	3.06%	3.08%	3.12%	664.302.854
4	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	108	120	122	127
5	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	177	177	179	185

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 sebanyak 2.230.010 wisatawan meningkat menjadi 4.232.475 wisatawan pada tahun 2011. Kunjungan wisatawan yang meningkat tajam pada tahun 2011 terutama dipengaruhi adanya program *Visit Kabupaten Bogor Tahun 2011* selain juga didukung semakin banyaknya event kegiatan pariwisata maupun kegiatan ekonomi lainnya yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor. Penambahan jumlah kunjungan diharapkan terus bertambah pada tahun-tahun selanjutnya. Kunjungan wisata diharapkan terus meningkat seiring dengan membaiknya kualitas dan bertambahnya jumlah sarana prasarana, obyek maupun destinasi wisata yang menarik dan terintegrasi. Berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Bogor ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pula kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, baik harga berlaku, maupun harga konstan.

5) Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.34. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Produksi perikanan	95.44	95.99	96.54	99.13
2	Konsumsi Ikan	97.96	98.03	98.82	101,36
3	Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	17.50	17.50	17.50	22,50
4	Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)				
	- Kelompok Pemula	N/A	36.11	64.85	64,64
	- Kelompok Lanjut	N/A	52.78	25.45	25,97
	- Kelompok Madya	N/A	10.42	8.48	8,29
	- Kelompok Utama	N/A	0.69	1.21	1,10
5	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	N/A	N/A	24.85	23,20
6	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	95.44	95.99	96.54	99.13

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Produktivitas usaha perikanan selama empat tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif, dimana realisasi produksi dan konsumsi selalu mendekati target. Sampai dengan akhir tahun 2011, produksi perikanan konsumsi mencapai 56.576,68 ton. Berdasarkan potensi perikanan yang ada, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 197 kabupaten/kota kawasan Minapolitan di Indonesia, dan salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dalam rangka menunjang pencapaian kinerja pelayanan bidang perikanan, Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor terus melakukan pembinaan kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang ada.

6) Perdagangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	13.71%	14.42%	15.08%	15,84%
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan	13.05%	13.57%	13.72%	14,07%
3	Ekspor Bersih perdagangan	\$ 407,974,457	\$ 407,974,457	\$ 485,255,530	\$ 803.660,547
4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	N/A	32.38%	33.77%	47,30%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Meningkatnya ekspor perdagangan tidak lepas dari kinerja pelayanan urusan perdagangan. Hasil tersebut tampak dari besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang terus meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berbagai layanan kemudahan ekspor yang didukung sarana prasarana yang mencukupi menjadikan urusan perdagangan mampu menjadi unggulan. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan persaingan global yang makin tajam. Selain itu, upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal sangat berpengaruh pada kinerja urusan perdagangan ini.

7) Perindustrian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian selama periode 2008-2011 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.36. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku	61.76%	61.18%	60.20%	59,39%
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan	62.55%	61.74%	61.23%	60,94%
3	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga berlaku	12.35%	12.24%	12.04%	11,47%
4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga konstan	12.51%	12.35%	12.25%	8,11%
5	Pertumbuhan industri	N/A	3.11	2.31	5,65
6	Cakupan bina kelompok pengrajin	56.26%	60.48%	80.40%	94,65%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Kinerja pelayanan urusan perindustrian sebenarnya tampak dari seberapa besar cakupan bina kelompok pengrajin yang terus menerus meningkat, yaitu 56,26% pada tahun 2008, 60,48% pada tahun 2009, 80,40% pada tahun 2010, dan 94,65% pada tahun 2011. Semakin besar cakupan bina kelompok pengrajin maka akan semakin besar pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, yaitu mencapai kurang lebih 60%. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan.

8) Transmigrasi

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan transmigrasi selama periode 2008-2011 tidak menghasilkan kinerja mengingat sejalan dengan berkembangnya semangat otonomi daerah, minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tidak ada walaupun upaya untuk melakukan dorongan dan motivasi terus dilakukan.

Tabel 2.37. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Transmigrasi Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
1	Transmigran swakarsa	0	0	0	0
2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	0	0	0	0

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Bogor. Namun apabila laju pertumbuhan ekonomi lebih kecil daripada laju pertumbuhan penduduk angkatan kerja, produktivitas total daerah justru akan turun, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2011.

Tabel 2.38. Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	490,651	452,963	455,319	
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	274,56	214,307	216,456	
3	Produktivitas total daerah	38,87	41,56	38,57	
	Pertanian				
1	Nilai tukar petani	95,99	97,21	97,45	

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Sektor usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB merupakan sektor yang tepat untuk dikembangkan sebagai aktivitas utama ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi, fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan daerah.

Tabel 2.39. Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
I	Perhubungan				
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,01415	0,01404	0,01393	...
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	8,606	11,193	12,861	...
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1,721	2,065	2,479	...
II	Penataan Ruang				
1	Ketaatan terhadap RTRW	75,00	80,00	82,00	84,00
2	Luas wilayah produktif	86,97	86,97	92,60	100,97
3	Luas wilayah industri	0,33	0,35	0,38	0,21
4	Luas wilayah banjir	4,93	4,98	5,03	5,08
5	Luas wilayah kekeringan	5,44	5,50	5,58	2,83
6	Luas wilayah perkotaan	46,45	46,45	46,45	46,45
III	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	17	17	17	...
2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	206	207	208	...
IV	Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	23,20%	27,03%	28,57%	33,33%

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Kondisi infrastruktur wilayah harus mendapatkan perhatian agar dapat menunjang jalur distribusi perekonomian sehingga berfungsi secara optimal. Salah satu indikator keberhasilan penanganan sistem transportasi darat di Kabupaten Bogor adalah tingkat kemantapan jalan yang mencapai 81,10% dari total panjang jalan kabupaten 1.748,915 km. Namun demikian, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan relatif kecil, justru semakin menurun dari 0,01415 pada tahun 2008 menjadi 0,01393 pada tahun 2010. Kondisi sistem transportasi darat lainnya seperti kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal dan jembatan timbang, serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda angkutan, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Di lain pihak, jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Bogor relatif semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Pelayanan angkutan massal masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah tengah Kabupaten Bogor.

Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor sepenuhnya mengacu pada RTRW Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Sebagai upaya pengendalian terhadap perizinan pemanfaatan ruang, telah dibuat Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang yang menetapkan secara rinci aturan-aturan teknis berdasarkan jenis kegiatan dan peruntukan ruang di lokasi yang akan dimanfaatkan. Tingkat ketaatan terhadap RTRW selama empat tahun terakhir semakin meningkat, yaitu 75% pada tahun 2008, 80% pada tahun 2009, 82% pada tahun 2010, dan 100% pada tahun 2011.

Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Sebagian besar wilayah di sebelah Selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Bogor menjadi kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi, elevasi dan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kawasan budidaya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor.

Secara umum, tata ruang Kabupaten Bogor terbentuk dengan struktur ruang wilayah yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan pengembangan, merupakan bentuk/gambaran sistem pelayanan berhirarki, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Bogor.

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bogor pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor.

Perkembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bogor pada beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Untuk menunjang sistem perdagangan dan jasa, tersedia fasilitas perbankan dan asuransi yang terus bertambah. Hal ini merupakan pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

C. Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Namun demikian, di tingkat mikro iklim investasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antar lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Tabel 2.40. Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Iklim Berinvestasi Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	Angka kriminalitas	9.15	10.57	9.59	8,42
2	Jumlah demo	83	64	83	11
3	Lama proses perizinan	3-14 HK	3-14 HK	3-14 HK	3-14 HK
4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	8 Pajak / 28 retribusi	8 Pajak / 28 retribusi	8 Pajak/ 24 retribusi	8 Pajak/ 24 retribusi
5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	N/A	63	63	63
6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	17,76	34,11	43,22	1,40

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2011 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Faktor pendukung lainnya yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu di Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten bogor. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten bogor.

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak mampu segera diakomodasi, salah satunya dengan pengaturan 'closed list' jenis retribusi yang dapat ditarik di daerah, sehingga pada tahun 2010 terdapat pengurangan dari 28 menjadi 24 retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Dari 411 desa dan 17 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor, persentase desa/kelurahan berstatus swasembada semakin meningkat, yaitu 17,76% pada tahun 2008, 34,11 pada tahun 2009, dan 43,22% pada tahun 2010.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk merupakan aset, terutama apabila ditunjang dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bogor masih sangat ideal, terutama dengan semakin berkurangnya rasio ketergantungan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dari 59,29% pada tahun 2008, 56,59% pada tahun 2009, dan 47,28% pada tahun 2010 walaupun pada tahun 2011 naik kembali menjadi 50,32 namun tetap masih sangat ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, sehingga rasio lulusan S1/S2/S3 semakin meningkat dari 121,98% pada tahun 2008 menjadi 160,70% pada tahun 2011, dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan pasar. Secara umum daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.41. Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2008-2011

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011
I	Ketenagakerjaan				
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	121.98	129.32	143.60	160,70
2	Rasio ketergantungan	59.29	56.59	47.28	50,32

Sumber : LKPJ Bupati Bogor Tahun 2011

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kinerja yang berkenaan dengan urusan pemerintahan/prioritas pembangunan, dikontribusikan oleh pencapaian kinerja pada urusan wajib dan urusan pilihan, terdiri dari 241 program dan 3.021 kegiatan, yaitu :

- (1) Percepatan Implementasi Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, yang diindikasikan dengan:
 - a) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar 98,3%;
 - b) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar 104,5 %;
 - c) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan sebesar 101,35%;
 - d) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan sebesar 106,14%;
 - e) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar 102,3%;
 - f) Didukung pula oleh capaian kinerja dari Dinas Bina Marga dan Pengairan.

- (2) Peningkatan Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja yang diindikasikan dengan:
 - a) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Perijinan Terpadu sebesar 106,7%;
 - b) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 103,18%;

- (3) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, yang diindikasikan dengan:
 - a) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan sebesar 96,19%;
 - b) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kesehatan sebesar 106,03%;

- c) Realisasi rata-rata capaian kinerja RSUD Cibinong sebesar 101,55%;
 - d) Realisasi rata-rata capaian kinerja RSUD Ciawi sebesar 96,7%;
 - e) Realisasi rata-rata capaian kinerja RSUD Leuwiliang sebesar 97,8%;
 - f) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar 101,08%.
- (4) Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, yang diindikasikan dengan :
- a) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar 88,27%;
 - b) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Tata Bangunan dan Permukiman sebesar 101,9%;
 - c) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar 101,2%;
 - d) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar 80%;
 - e) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebesar 99,87%;
 - f) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup sebesar 111,5%;
 - g) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 109,25%;
 - h) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Lalu Lintas dan Jalan Raya sebesar 82,3%;
 - i) Didukung pula oleh capaian kinerja dari Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (5) Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata, yang dikontribusikan oleh urusan kebudayaan yang diindikasikan dengan realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 93,37%.
- (6) Pembangunan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, yang diindikasikan dengan :
- a) Realisasi rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 105,2%;
 - b) Realisasi rata-rata capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 88,9%;
 - c) Realisasi rata-rata capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 100%;
 - d) Didukung oleh capaian kinerja Dinas sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemuda dan Olah Raga.

- (7) Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah yang diindikasikan dengan :
- a) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 99,9%;
 - b) Realisasi rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 105,2%;
 - c) Realisasi rata-rata capaian kinerja Sekretariat Dewan sebesar 84,2%;
 - d) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar 96,4%;
 - e) Realisasi rata-rata capaian kinerja Inspektorat sebesar 99,99%;
 - f) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah sebesar 100,94%;
 - g) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 85,3%;
 - h) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Perijin Terpadu sebesar 106,70%;
 - i) Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 112,1%;
 - j) Realisasi rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 109,7%;
 - k) Realisasi rata-rata capaian kinerja Sekretariat Dewan KORPRI sebesar 100 %;
 - l) Realisasi rata-rata capaian kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebesar 93,31%.

2.2.2. Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan

Secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.38 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Bogor

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada permasalahan pokok sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan.

Rendahnya tingkat pendidikan diperlihatkan oleh: (1) masih tingginya angka buta huruf; (2) masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RRLS) masyarakat Kabupaten Bogor yang pada tahun 2011 baru mencapai 8,25 tahun, atau baru mencapai kelas 2 SLTP, yang berarti belum mencapai penyelesaian wajar dikdas; (3) masih rendahnya jumlah guru yang bersertifikat profesional di semua jenjang tingkat pendidikan; (4) belum sesuai kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan daya saing.

Rendahnya tingkat kesehatan ditandai oleh indikator usia harapan hidup penduduk Kabupaten Bogor yang masih rendah. Penciri lainnya yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat kesehatan adalah: (1) tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB); (2) tingginya angka gizi buruk pada anak balita; (3) rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; (4) rendahnya angka aksesibilitas pelayanan kesehatan; dan (5) masih rendahnya cakupan sarana air bersih (SAB).

- 2) Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat.

Rendahnya ekonomi masyarakat terlihat dari rendahnya pendapatan per kapita. Permasalahannya meliputi rendahnya investasi, rendahnya ekspor, kurang vitalnya pertanian, belum berdayanya industri kecil menengah (IKM), belum berkembangnya pariwisata, belum berdayanya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan.

Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Permasalahannya belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal. Masih rendahnya infrastruktur pendukung merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di kabupaten bogor. Berkembangnya sektor industri belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran.

Rendahnya ekspor terjadi karena kualitas produk yang kurang sesuai dengan permintaan dan standar internasional, kurangnya akses pasar, belum optimalnya pengembangan keberagaman produk ekspor, belum optimalnya fasilitasi ekspor, serta krisis ekonomi global yang berdampak pada menurunnya permintaan.

Pengembangan agroindustri belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya, pengembangan pada sistem pertanian masih bersifat parsial, serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya ketersediaan input produksi pertanian dan belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi, belum meningkatnya produksi dan stok bahan pangan pokok, belum terkendalinya tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok serta belum terbentuknya pola kawasan industri yang baik di Kabupaten Bogor. Hal-hal tersebut mengakibatkan tidak terakomodasinya seluruh sektor industri di Kabupaten Bogor.

Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah sebagai akibat belum meratanya penerapan teknologi, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian serta belum memadainya dukungan sarana dan prasarana. Wilayah budidaya pertanian relatif masih terbatas di wilayah dataran rendah bagian utara Kabupaten Bogor. Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan tidak optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya seperti danau/waduk. Pengalihan tata guna lahan untuk permukiman dan industri secara tidak terkendali mengakibatkan penyusutan lahan pertanian dan penurunan kualitas sumber daya air.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi adalah belum berdayanya industri kecil menengah (IKM). Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas.

Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Bogor belum digali dan dikembangkan sebagai potensi wisata kabupaten bogor. Peningkatan kinerja obyek dan daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta belum tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional. Pengembangan wisata alam daerah puncak kini dihadapkan pada isu terganggunya fungsi wilayah ini sebagai daerah konservasi.

Peranan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan serta rentannya umkm terhadap perubahan harga bahan bakar.

Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain belum efisiennya sistem distribusi barang sehingga harga relatif tinggi, belum optimalnya penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, belum optimalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta belum optimalnya penataan sarana perdagangan.

Permasalahan tingginya angka pengangguran disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar di kabupaten bogor belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.

Permasalahan lainnya adalah masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan, serta belum tertatanya sistem distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

- 3) Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

Aspek infrastruktur transportasi di wilayah kabupaten bogor hanya terdiri dari transportasi darat. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Tingkat kemantapan jaringan jalan kabupaten bogor berada pada kondisi sedang. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (mst). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di kabupaten bogor dengan baik, termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan

rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan di kabupaten bogor.

Keterbatasan kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain adalah kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi, khususnya pergerakan di wilayah tengah kabupaten bogor.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air, dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di kabupaten bogor yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai.

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan, baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari pln, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga (plt) mikro hidro, surya, dan angin. Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Kondisi ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan jasa telepon kabel tetap, salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Sementara itu untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program kemampuan pelayanan universal (kpu)/universal service obligation (uso) yang digagas oleh pemerintah pusat.

Cakupan pelayanan prasarana dasar terutama di pedesaan masih rendah sebagai akibat tingginya kerusakan prasarana yang ada. Pengembangan infrastruktur wilayah masih terkendala kepada pembebasan lahan. Sumber air baku untuk air

minum di wilayah kabupaten bogor terutama pada musim kemarau cenderung semakin berkurang. Demikian pula mutu air tanah dan air permukaan semakin rendah sebagai akibat pencemaran lingkungan, yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah terutama di perkotaan dan pemukiman padat masih menjadi kendala sebagai akibat kurangnya lahan untuk tempat pembuangan akhir (tpa) dan sarana pendukung.

- 4) Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, belum terbebasnya pemerintahan daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), serta belum optimalnya pelayanan publik.

- 5) Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Hal ini terjadi karena semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial belum optimal seperti tercermin dengan masih adanya tempat prostitusi/warung remang-remang, harmonisasi sosial dan kerukunan di kalangan umat beragama belum terwujud, serta pelayanan kehidupan beragama masih terbatas.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan daerah, yaitu:

1. Dinas Pendidikan

Permasalahan dan solusi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

Terdapat 9 Indikator dari 33 IKK yang tidak mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam RPKD yaitu AMH, APK SMA/MA/PC, rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun, Rasio siswa terhadap guru SD-MI, Rasio guru terhadap kelas SD-MI, Persentase ruang kelas kondisi baik untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN, angka putus sekolah siswa SD-MI, SMP/MTs dan SMMA. Penyebab ketidakberhasilan pencapaian target tersebut, berdasarkan hasil evaluasi terhadap masing-masing indikator dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) AMH, dari target 97,91% terealisasi 95,71% atau 97,13%. Penyebabnya antara lain; (1) Adanya migrasi penduduk dari luar yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor karena dipicu faktor ekonomi, terutama berkembangnya sektor informal dan dunia industri; (2) Para alumnus peserta pendidikan keaksaraan fungsional yang sebagian berasal dari kelompok manula, karena faktor lingkungan dan budaya kehidupan sehari-hari, tidak dapat mempertahankan kemampuan baca tulis, sehingga kembali ke kondisi buta aksara. Solusi untuk pemecahan masalah tersebut adalah :
 - Mengupayakan validasi data sasaran melalui pendataan ulang di tingkat desa/kelurahan oleh para penilik dan atau satgas pemberantasan buta aksara tingkat kelurahan, termasuk pendataan terhadap penduduk pendatang yang disinyalir berpotensi menjadi penyebab meningkatnya warga buta aksara.
 - Kolaborasi penanganan pendidikan keaksaraan fungsional yang lebih efektif antara Dinas Pendidikan dengan lembaga-lembaga lain, termasuk perguruan tinggi dan dewan mesjid.
- 2) APK SMP/MTs/PB dari target 99,60 terealisasi 95,07% atau tercapai 95,41% atau minus 5,47%. Penyebabnya antara lain; (1) Sebagian besar karena faktor ekonomi keluarga; (2) Faktor mental budaya; rendahnya tingkat kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan; (3) Belum optimalnya implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa miskin; (4) Dalam beberapa kasus di beberapa daerah, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana pendidikan karena faktor geografis. Strategi peningkatan APK dilakukan antara lain melalui :
 - Penguatan program perluasan daya tampung dan penyediaan sarana prasarana di setiap titik pemukiman di mana penduduk usia sekolah berada;
 - Menjamin penduduk usia sekolah pendidikan dasar khususnya dari kelompok masyarakat miskin bebas biaya sekolah melalui BOS, BSM dan bantuan pendidikan lainnya;
 - Pengembangan sekolah alternatif : Kelas jauh, SMP Terbuka, SD/SMP satu atap, penyelenggaraan program kesetaraan, dan mengupayakan bantuan beasiswa transisi bagi lulusan SD/MI, intensifikasi dan validasi pendataan penduduk usia sekolah di setiap kecamatan;
 - Mengupayakan bantuan beasiswa transisi bagi lulusan SD/MI untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya;
 - Intensifikasi dan validasi data penduduk usia sekolah (PUS) di setiap kecamatan.

- 3) Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar terhadap penduduk usia 7-12 tahun, dari target 44,79 point terealisasi 42,33 point atau tercapai 94,51%. Penyebabnya antara lain (1) kendala geografis dan tofografi wilayah di beberapa kecamatan kurang mendukung didirikannya sekolah, (2) keberadaan PUS yang menyebar secara sporadis sehingga sulit menetapkan titik strategis untuk pendirian sekolah. Keterbatasan keberadaan lembaga sekolah di atas dapat diatasi melalui:
- Pendirian sekolah kelas jauh dan PKBM sebagai cikal bakal pendirian sekolah permanen;
 - Mendorong DU/DI untuk berkontribusi mendirikan sekolah-sekolah baru khususnya di wilayah-wilayah peripheral (pinggiran).
- 4) Rasio siswa terhadap guru SD/MI dari target 37,19% realisasinya 38,86% atau tercapai 95,51% penyebabnya antara lain (1) dalam 10 tahun terakhir, rekrutmen guru baru tidak seimbang jumlahnya dibanding guru memasuki pensiun, (2) adanya kebijakan moratorium pengangkatan PNS, (3) kewenangan penetapan alokasi dan pengangkatan guru berada di pemerintah. Upaya pencapaian Rasio ideal dilakukan melalui antara lain :
- Usulan penambahan guru PNS ke Pusat;
- Rekrutmen guru honor atas beban APBS dan atau sumber lain yang sah;
 - Pemerataan penempatan penugasan guru.
- 5) Rasio guru terhadap kelas SD/MI dari target 1,10% terealisasi 1,15 atau tercapai 95,45%. Penyebab ketidaktercapaian rasio dimaksud dikarenakan tidak tercapainya rasio siswa terhadap guru. Pemecahan masalahnya adalah pemenuhan rasio guru/kelas dilakukan melalui usulan penambahan kuota CPNS ke tingkat pusat disamping mengoptimalkan guru yang ada melalui penugasan rangkap di dua atau lebih sekolah sesuai tuntutan beban mengajar.
- 6) Persentase bangunan SMPN dan SMAN/SMKN dalam kondisi baik, dalam hal ini ruang kelas baik, dari target 93,40% terealisasi 86,86% atau tercapai 92,97%. Penyebabnya antara lain (1) tingkat pertumbuhan ruang kelas yang rusak tidak seimbang dengan penambahan ruang kelas baik karena alokasi anggaran tidak mampu mengakomodir semua kerusakan, (2) usia teknis bangunan lebih pendek dari yang seharusnya, karena kualitas bangunan pada saat dibangun awal tidak optimal. Upaya pemenuhan target ke depan dilakukan melalui :
- Mengupayakan penambahan alokasi anggaran kegiatan rehabilitasi sesuai kebutuhan dari berbagai sumber;
 - Mendorong DU/DI ikut serta memperbaiki sarana prasarana pendidikan;

- Memberdayakan orang tua siswa dari golongan mampu untuk bersama-sama melakukan perbaikan ruang kelas.
- 7) Angka Putus sekolah di semua jenjang pendidikan dari target masing-masing 0,266%, 0,890% dan 0,540% untuk SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA terealisasi masing-masing 0,264% (98,46%), 0,885% (99,44%) dan 0,544% (99,26%). Penyebab ketidaktercapaian sasaran, selain faktor ekonomi, juga karena masalah kultur yaitu adanya fenomena budaya nikah dini dan kerja dini. Untuk mengatasi fenomena DO di semua jenjang pendidikan, upaya yang dilakukan antara lain :
- Peningkatan efektivitas program bantuan siswa miskin;
 - Perluasan cakupan sasaran siswa miskin melalui penambahan anggaran khususnya untuk beasiswa transisi (beasiswa yang diberikan kepada siswa lulusan SD/MI/SMP/MTs untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya);
 - Peningkatan efektivitas pengelolaan BOS di tingkat sekolah agar siswa miskin terjamin kebutuhan operasional untuk tetap bertahan sekolah.
- 8) Indikator APT sebagaimana halnya indikator AMH dan Rata-rata Lama Sekolah tidak dapat diukur oleh Dinas Pendidikan mengingat pengukuran kinerja tersebut melibatkan data hasil survey yang kewenangannya berada di BPS. Solusi untuk dapat mengukur ketiga indikator tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BPS melalui BAPPEDA.

2. Dinas Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari target tahun 2011 sebesar 87,5% baru tercapai 80,38%, hal ini disebabkan belum seluruh bidan praktek swasta berperan serta dalam pelaksanaan jampersal (melakukan Ikatan Kerjasama/IKS) dan belum seluruh desa menjalankan kemitraan bidan dan paraji secara optimal.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Keterlibatan lintas sektor yang perlu ditingkatkan;
- 2) Meningkatkan persalinan tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan dengan mengembangkan puskesmas mampu PONEB;
- 3) Optimalisasi kemitraan dengan dukun/paraji di seluruh desa;
- 4) Sosialisasi jampersal ke Bidan praktek swasta.

3. RSUD Cibinong

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor selama tahun 2011, yaitu Operasional gedung rawat inap kelas III yang belum berjalan dan berpengaruh terhadap sasaran ketersediaan tempat tidur rawat inap, khususnya kelas III dan Kurangnya tenaga paramedis keperawatan.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu Penyelesaian Gedung Rawat Inap Kelas III dan Penambahan tenaga medis keperawatan untuk memenuhi standar asuhan keperawatan.

4. RSUD Ciawi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya tingkat hunian tempat tidur (*Bed Occupancy Rate*) dari target 65%, baru terpenuhi 60,16%;
- 2) Belum maksimalnya ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit dari target 65% hanya tercapai 46,61%;
- 3) Belum terpenuhinya Rasio Perawat per tempat tidur dari target 1 : 1 realisasi mencapai 1 : 0,73 tempat tidur;
- 4) Belum terpenuhinya Rasio dokter untuk setiap Satuan Manajemen Fungsional (SMF) dasar (spesialis bedah, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan spesialis kebidanan) dimana rasio 1 SMF minimal 4 orang tenaga spesialis baru mencapai 1 : 3,5 orang;
- 5) Belum tercapainya jumlah layanan instalasi dari target 15 layanan instalasi baru tercapai 14 layanan instalasi.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Solusi yang berkenaan dengan BOR, yaitu :
 - Meningkatkan promosi dan kerjasama layanan Rumah Sakit ke pihak ke III maupun melalui media massa.
 - Meningkatkan performa dan mutu layanan rumah sakit,
 - Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan fungsional kesehatan dan fungsional lainnya.
- 2) Solusi yang berkenaan dengan peningkatan ketersediaan tempat tidur yaitu :
 - Menambah jumlah tenaga perawat dan dokter spesialis sesuai standar agar kapasitas tempat tidur kelas III dapat difungsikan

- 3) Solusi yang berkenaan dengan belum terpenuhinya rasio jumlah perawat per tempat tidur
 - Meningkatkan jumlah perawat sesuai standar melalui *recruitment* pegawai baik melalui BKPP Kabupaten Bogor maupun pengangkatan pegawai BLUD.
- 4) Solusi yang berkenaan dengan belum terpenuhinya rasio jumlah dokter spesialis per SMF dasar
 - Menambah jumlah dokter spesialis untuk masing-masing SMF dasar melalui *recruitment* pegawai baik melalui BKPP kabupaten Bogor maupun mengajukan ke Depkes Pusat dan Dinkes Provinsi
- 5) Solusi yang berkenaan dengan belum terpenuhinya jenis layanan instalasi
 - Melakukan diversifikasi jenis layanan instalasi melalui pemenuhan sarana prasarana serta pemenuhan kualitas tenaga sesuai standar layanan instalasi yang akan dikembangkan

5. RSUD Leuwiliang

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Target peningkatan jumlah instalasi pada tahun 2011 sebanyak 11 instalasi baru tercapai 10 instalasi dikarenakan instalasi pemulasaraan jenazah belum terlaksana;
- 2) Target rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional, yaitu 2 orang dokter spesialis per SMF pada tahun 2011 dengan target 1 orang dokter spesialis per SMF tercapai 0,625 orang;
- 3) Terbatasnya ruangan perawatan kelas III penyakit dalam dan anak mengakibatkan sering terjadinya pemanfaatan tempat tidur ruangan lain yang tidak sebagai peruntukannya.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Mengusulkan penambahan tenaga dokter spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam, untuk spesialis penyakit dalam saat ini “meminjam” dari rumah sakit lain (RSUD Ciawi);
- 2) Mengusulkan pembangunan gedung perawatan khususnya untuk kelas III;

6. Badan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan kegiatan usaha tidak diiringi dengan penambahan jumlah tenaga pengawas lingkungan;
- 2) Belum terakreditasinya Laboratorium BLH Kabupaten Bogor;
- 3) Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan belum optimal.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Memaksimalkan koordinasi, pendayagunaan aparat serta meningkatkan pengawasan swapantau dari setiap kegiatan/usaha sebagaimana Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pasal 1 poin c;
- 2) Melibatkan peran serta masyarakat melalui peran aktif aparat di tingkat kecamatan;
- 3) Melaksanakan upaya peningkatan laboratorium lingkungan menjadi laboratorium pengujian yang terakreditasi.

7. Dinas Bina Marga dan Pengairan

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Jalan Bojong Nangka–Cikeas, Desa Cikeas Kecamatan Gunung Putri.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Bojong Nangka – Cikeas Desa Cikeas Kecamatan Gunung Putri dengan panjang jalan 8.270 m tidak dapat direalisasikan pada tahun 2011, dikarenakan waktu pelaksanaan yang tersisa di tahun 2011 tidak mencukupi, setelah proses lelang sisa waktu pelaksanaan tinggal 18 hari sedangkan pelaksanaan kontrak pekerjaan diperlukan waktu 6 bulan. Adapun strategi pemecahan masalahnya, yaitu kegiatan fisik konstruksi akan dilaksanakan di tahun 2012 dan telah dialokasikan pada DPA Tahun Anggaran 2012;

- 2) Pembangunan Jembatan Cianten pada Ruas Jalan Lingkar Utara Leuwiliang (Sta. 1+750) Kecamatan Leuwiliang.

Penyedia jasa kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Bobot fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan PT. Cipadang Jayabaya Utama selaku penyedia jasa

sampai dengan akhir waktu penyelesaian pekerjaan adalah 70,30%. Konsekuensi dari hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak akibat wanprestasi dari pihak penyedia jasa. Adapun strategi pemecahan masalahnya, yaitu Sisa bobot fisik pekerjaan sebesar 29,70% akan dilelangkan pada Tahun Anggaran 2012;

- 3) Pembuatan Dinding Penahan Tanah pada Ruas Jalan Cilebut – Citayam (Sta. 1+950) Kecamatan Sukaraja.

Adanya musibah bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu pelaksanaan, membuat pelaksanaan pembuatan dinding penahan tanah pada ruas jalan Cilebut – Citayam (Sta. 1+950) Kecamatan Sukaraja, menjadi terlambat, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir waktu pelaksanaan menjadi sangat kecil (kurang dari 5%). Adapun strategi pemecahan masalahnya, yaitu Paket pekerjaan tersebut di atas dimasukkan lagi dalam program/kegiatan Tahun Anggaran 2012; dan

- 4) Kegiatan Pembebasan Tanah terdapat beberapa permasalahan, yakni revisi trase, terdapat status kepemilikan tanah belum jelas dan belum adanya kesepakatan ganti rugi tanah. Adapun strategi pemecahan masalahnya, yaitu mempercepat proses revisi trase, mendorong penyelesaian masalah kepemilikan tanah dan mengintensifkan musyawarah parsial dengan pemilik tanah.

8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Kendaraan truk tinja yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor sudah berumur diatas 8 tahun sebanyak 2 Unit, bahkan ada yang sudah mencapai usia diatas 18 tahun sebanyak 6 Unit. Sehingga pelayanan kurang maksimal;
- 2) Tidak adanya IPLT sehingga pembangunan air kotor/tinja dilakukan di IPLT Kota Depok tepatnya di Desa Kalimulya;
- 3) Banyaknya Pelayanan penyedotan tinja yang dilakukan oleh pihak swasta dan mobilitasnya pun lebih baik;
- 4) Keterbatasan pagu anggaran pada tahun 2011 mengakibatkan hasil pembangunan taman air mancur gerbang kantor Bupati Bogor belum memenuhi harapan, yakni berupa taman yang representatif dengan fasilitas pendukung yang tertuang dalam perencanaan.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Harus adanya penggantian kendaraan truk air kotor yang lebih baik;
- 2) Dibangunnya IPLT yang berada di Kabupaten Bogor sehingga pembuangannya tidak menginduk ke IPLT yang berada di kota Depok;
- 3) Sebaiknya pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan pihak swasta mendapatkan rekomendasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor;
- 4) Melanjutkan pembangunan taman air mancur gerbang kantor Bupati Bogor pada tahun anggaran 2012, sehingga hasilnya dapat memenuhi harapan yang tertuang dalam perencanaan.

9. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Indikator kinerja yang ada terlalu banyak dan terlalu rinci sehingga tidak fokus pada penerapan di kegiatannya;
- 2) Terdapat beberapa Indikator kinerja yang tidak ada dukungannya pada program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun anggaran 2011 seperti indikator Luas Wilayah Produktif, Luas Wilayah Kekeringan dan Kebanjiran.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Perlu adanya perumusan kembali indikator kinerja tersebut berdasarkan kondisi di daerah;
- 2) Merumuskan atau merancang kembali program dan kegiatan yang mendukung pada indikator tersebut.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Akurasi dan validasi data
 - Persepsi dan metode perhitungan daya yang berbeda dan berubah-ubah
 - Data belum terintegrasi satu data (bank data)
- 2) Aplikasi hasil-hasil penelitian
 - Penerapan hasil-hasil penelitian masih rendah
- 3) Evaluasi kinerja pembangunan
 - Pemahaman SKPD terhadap ketentuan evaluasi kinerja masih rendah

- Kepatuhan/ketaatan SKPD terhadap penyampaian laporan kinerja tepat waktu masih rendah

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Peningkatan kerjasama dengan BPS;
- 2) Peningkatan jejaring penelitian dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- 3) Pengembangan dan penerapan evaluasi kinerja berbasis sistem.

11. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 216/PMK.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, Kabupaten Bogor mendapatkan dana DAK Bidang Perumahan sebesar Rp. 5.253.000.000.

Tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Pembangunan PSU Kawasan Perumahan yang berasal dari DAK Kemenpera tahun 2011 sebesar Rp. 5.253.000.000 dan dana pendamping sebesar 10% dari nilai bantuan DAK atau sebesar Rp. 523.300.000 yang berlokasi di Kecamatan Parung Panjang sektor 3 dan 4. Kegiatan ini bekerjasama dengan Perumnas untuk membangun prasarana dan utilitas umum berupa pembangunan PJU, jaringan listrik, jaringan air minum dan *septic tank* komunal di kawasan perumahan berbasis MBR/ M.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Sektor 3 Perumnas Parung Panjang tidak dapat diusulkan mendapat bantuan DAK karena selain sektor 3 telah mendapat bantuan stimulan PSU, di sektor 3 juga telah terbangun komponen DAK.
 - Sektor 4 Perumnas Parung Panjang tidak dapat diusulkan mendapat bantuan DAK karena lokasi perumnas Parung Panjang masih 0% (hutan) dari berbagai aspek.
 - Komponen DAK tidak bisa diserap di lokasi lain/ lokasi pengganti
 - Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011
- 2) Pembangunan perumahan yang tidak dilengkapi perijinan yang dipersyaratkan, berskala kecil (dibawah 1 Ha), perijinannya masih dalam proses namun telah membuka lahan;

- 3) Berkaitan dengan PSU (Prasarana Sarana Utilitas)
 - Kondisi lahan peruntukan PSU umumnya tidak terawat dan belum siap bangun
 - Terdapatnya lahan PSU yang ditempatkan di lokasi yang tidak mungkin untuk dibangun
 - luasan lahan PSU umumnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam SK Siteplan
 - Masih banyak jumlah PSU di kawasan perumahan yang belum diverifikasi dan diserahterimakan sehingga menjadi kendala dalam pemanfaatannya
 - Beberapa pengembang ada yang sudah meninggalkan kawasan perumahan sehingga menyulitkan melakukan pendataan
- 4) Permasalahan dalam hal perizinan yang dihadapi adalah umumnya timbul akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis seperti dalam IPPT, Ijin Lokasi, *Site Plan* dan sebagainya. Hasil Pengendalian dan pengawasan di lapangan ternyata masih terjadi pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan teknis hal ini berkaitan dengan proses penerbitan IMB di BPT;
- 5) Dalam pengesahan *Site Plan* saat peninjauan lokasi ditemukan bangunan yang sudah berdiri tanpa memiliki IMB dan luas lahan tutupan (KDB) melebihi ketentuan, persyaratan teknis sebagian besar terjadi pada bangunan industri;
- 6) Berkaitan dengan Pembebasan Tanah dan Bangunan pada Bidang Tata Bangunan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Bogor dalam hal menghitung Harga Dasar Bangunan yang terkena pembebasan, hambatan yang ditemui pada umumnya masyarakat menilai harga taksiran dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman membuat taksiran harga lebih rendah dari seharusnya;
- 7) Kurangnya personil Bidang Tata Bangunan yang dapat menangani permasalahan pembebasan lahan dalam hal menaksir harga bangunan, dikarenakan tenaga ahli appraisal yang dapat melakukan tugas tersebut terbatas.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Program/Kegiatan DAK tidak dapat dilaksanakan dikarenakan :
 - Perumnas Parung Panjang tidak siap menerima bantuan DAK, maka perlu segera dicari lokasi pengganti agar DAK dapat terserap.
 - Dana DAK tersebut harus terserap di tahun 2011 dan tidak dapat di *multi years* kan.

- Kegiatan dibatalkan berdasarkan surat Kemenpera RI No. 343/DK/P K.05.01/IX/2011 tanggal 30 September 2011 perihal Permasalahan Pelaksanaan DAK Tahun 2011 dan surat Bupati Bogor No. 648.11/268/PP-DTBP tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pembatalan DAK Bidang Perumahan.
- 2) Memanggil pelaksana pembangunan perumahan untuk diberikan arahan agar segera memproses perijinan yang dipersyaratkan dan menghentikan kegiatan pembangunan hingga proses perijinan selesai. Apabila pelaksana tersebut tidak mengindahkan arahan yang telah diberikan maka akan diberikan teguran ke 1, 2 dan 3 untuk selanjutnya berkasnya diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindak lanjuti;
- 3) Memberikan himbauan kepada masyarakat dan pengembang perumahan tersebut agar dapat merawat PSU;
- 4) Mengundang pengembang perumahan untuk musyawarah mengenai kekurangan luas lahan PSU untuk dicarikan lahan tambahan;
- 5) Meningkatkan pengawasan Dinas dalam menangani kinerja konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan agar pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan karena jika konsultan yang melakukan pengawasan bekerja secara optimal akan berimplikasi langsung kepada kontraktor fisik sehingga dapat melakukan tugasnya secara baik, benar dan tepat waktu;
- 6) Perlu adanya penambahan personil baik dari luar dinas maupun mengoptimalkan yang ada di dalam dinas. SDM yang diperlukan terutama yang memiliki pendidikan Sarjana Strata Satu Jurusan Teknik Sipil maupun Arsitektur, dikarenakan beban kerja dan spesifikasi jenis kerja pada Bidang Tata Bangunan lebih besar pada jenis bidang teknik;
- 7) Perlu ada kesepakatan antara Dinas/Instansi yang terkait dalam hal ini BPT, Tata Ruang dan Pertanahan dan lainnya dengan Dinas Tata Bangunan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bogor dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang penerbitan IMB untuk meminimalisir munculnya permasalahan dalam hal perizinan yang timbul akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis seperti dalam IPPT, Ijin Lokasi, *Site Plan* dan sebagainya. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebagai pengemban dari program pengendalian dan pengawasan Bangunan dimana kegiatan terkaitnya adalah sebagai tim teknis dalam proses pembuatan IMB baik untuk perizinan IMB Kawasan Perumahan

dan Kawasan Non Perumahan di sepanjang tahun 2010 berusaha untuk merealisasikan tuntutan masyarakat dengan pelayanan yang cepat sehingga target retribusi dapat tercapai;

- 8) Mengenai pembebasan tanah, perlu adanya sosialisasi yang cukup mengenai manfaat, fungsi dan peruntukan kepada masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanah untuk pembangunan bangunan pemerintah/umum sehingga akan ada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat mengenai nilai bangunan. Hal ini akibat masyarakat yang terkena pembebasan awalnya tidak memiliki keinginan untuk menjual tanah dan bangunannya dan ketidaktahuan peruntukan, manfaat fungsi bangunan yang akan dibangun sehingga meminta harga yang lebih tinggi dari seharusnya.

12. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Jumlah Organisasi Olahraga (64 organisasi olahraga) Indikator jumlah Organisasi olahraga ada pada satu program : Program pengembangan manajemen olahraga pada tahun 2011 pada program dimaksud tidak ada kegiatan untuk organisasi /klub olahraga maka mempengaruhi tidak tercapai target 64 jumlah organisasi/klub olahraga yang dibina. Hal tersebut sebenarnya dapat dicapai melalui Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- 2) Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau milik pemerintah) karena rumusnya adalah jumlah sapras olahraga yang ada dibagi dengan jumlah penduduk sebesar $4.909,916 \text{ jiwa} \times 10.000$, maka hasil capaian menjadi 0,004086%

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Pada Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga kenyataan di lapangan ada kegiatan yang berdampak langsung pada Organisasi/klub olahraga, yaitu :
 - Invitasi Karate Daerah Kabupaten Bogor yang melibatkan peserta sebanyak 41 Dojo
 - Kejuaraan Balap Sepeda Bupati Cup
 - Invitasi Panjat Tebing Daerah melibatkan peserta dari klub Pencinta alam

- 2) Memberikan penjelasan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan akan capaian 0,00 % bahwa hal tersebut karena rumus perhitungannya.

13. Badan Perizinan Terpadu

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Luasnya jangkauan pelayanan Perizinan dan kurang lengkapnya data potensi investasi;
- 2) Terbatasnya jangkauan promosi investasi;
- 3) Terbatasnya peruntukan ruang untuk kegiatan industri/kawasan industri;
- 4) Terbatasnya penyediaan infrastruktur untuk investasi;
- 5) Makin meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investor;
- 6) Terbatasnya sarana, prasarana untuk arsip perizinan dan lahan parkir;
- 7) Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM;
- 8) Kendaraan operasional Badan Perizinan Terpadu.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu : Penyusunan naskah akademis produk hukum daerah terkait dengan investasi dan perizinan.

- 1) Mendorong terbentuknya kawasan industri;
- 2) Peningkatan jangkauan pelayanan perijinan melalui safari pelayanan, outlet pelayanan dan sosialisasi;
- 3) Mendorong SKPD teknis untuk membangun infrastruktur;
- 4) Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi investasi;
- 5) Optimalisasi forum investasi;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana arsip dokumen perizinan perkantoran dan Sumber daya manusia;
- 7) Melakukan perluasan lahan kantor;
- 8) Penambahan kendaraan operasional.

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, yaitu rendahnya nilai indikator pertumbuhan industri dari target 16,02 % terealisasi hanya 5,65%.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu: dalam rangka meningkatkan nilai

indikator pertumbuhan industri, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan manajemen dan kewirausahaan, fasilitasi kerjasama kemitraan UMKM dengan pihak swasta dalam rangka pengembangan permodalan dan promosi produk melalui pameran-pameran.

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Masih ada beberapa penduduk yang belum mau membuat KTP dan KK Kabupaten Bogor dan masih memegang KTP dari daerah asal;
- 2) Perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan belum terintegrasi dalam 1 (satu) aplikasi SIAK, sehingga menyulitkan untuk *update data* seperti penerbitan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Kematian;
- 3) Adanya peraturan bagi penduduk yang lahir diatas 1 tahun untuk penerbitan Akta Kelahirannya harus melalui penetapan pengadilan, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengurus Akta Kelahirannya;
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta pencatatan sipil;
- 5) Sebagian pemohon akta kelahiran tidak memiliki akta perkawinan yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi;
- 6) Jauhnya jarak domisili penduduk ke tempat pelayanan akta;
- 7) Banyak penduduk yang tidak melaporkan kedatangan ke desa/kelurahan dan kecamatan;
- 8) Pengoperasian SIAK masih secara *offline* (Semi Elektronik) karena belum memiliki jaringan komunikasi data dengan menggunakan teknologi yang handal dan secure (aman) yang beroperasi secara terus menerus tanpa putus;
- 9) Belum tersedianya *data base* kependudukan yang akurat sehingga penduduk yang mencatat akta kelahiran di luar daerah belum terdata.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana terdapat pasal yang menyatakan adanya sanksi administrasi bila tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP;
- 2) Meningkatkan status SIAK dari menjadi terintegrasi kedalam 1 (satu) aplikasi SIAK;

- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan kebijakan ini sehingga saat ini hanya dapat memproses permohonan Akta Kelahiran yang sudah melalui penetapan pengadilan (untuk permohonan Akta Kelahiran diatas 1 tahun);
- 4) Pelaksanaan sosialisasi baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- 5) Diberlakukannya Juknis pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mulai tanggal 11 Januari 2010 bagi yang tidak dapat menunjukkan akta nikah dapat digunakan SKKDT dan surat pernyataan perkawinan untuk penduduk yang menikah sebelum 1 Januari 2010;
- 6) Dilaksanakan pelayanan langsung jemput bola ke 40 kecamatan;
- 7) Pembinaan kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
- 8) Meningkatkan status SIAK dari *Offline* menjadi *Online*;
- 9) Dilaksanakannya Pencatatan dan Penulisan Biodata Penduduk melalui penerapan SIAK baik *offline* maupun *online*

16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Jumlah PMKS yang semakin tinggi karena permasalahan sosial yang semakin kompleks;
- 2) Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan, keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 7.969 orang, yang diterima bekerja sebanyak 4.462 orang atau 55,99%;
- 3) Penempatan Transmigrasi sebanyak 10 KK tidak dapat diberangkatkan ke UPT Sabunga Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 475.1/5068-Trans perihal Penempatan Calon Trans Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 4) Ada peningkatan jumlah kasus hubungan industrial, dari rencana 90 kasus yang diselesaikan 154 kasus dan jumlah pemogokan dari rencana 20 kasus yang diselesaikan 32 kasus;
- 5) Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, dari 2.921 perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek hanya 1.810 perusahaan.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Pada tahun berikutnya program-program dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial volumenya perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran pembantuan dari APBN dan APBD I;
- 2) Pada tahun berikutnya dalam penanganan pengangguran volumenya perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran pembantuan dari APBN dan APBD I;
- 3) Mengusulkan ke pusat agar memprioritaskan pemberangkatan transmigrasi dengan tujuan UPT Sabunga Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10 KK di tahun 2012;
- 4) Sosialisasi terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan perlu diintensifkan dan melibatkan semua pihak, khususnya serikat pekerja dan pihak pengusaha;
- 5) Sosialisasi dan edukasi secara terus menerus terhadap para pengusaha dengan melibatkan Jamsostek dan Serikat Pekerja serta Pengawas lebih dimaksimalkan pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan.

17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana;
- 2) Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 3) Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat;
- 4) Struktur atau anatomi Anggaran BPBD Tahun 2011, lebih besar pada pembiayaan Tanggap Darurat (pemberian bantuan) dan belum didukung dengan proses dan tenaga administrasi yang cukup baik sehingga proses intervensi berupa pemberian bantuan belum dapat berjalan secara optimal;
- 5) Pada struktur anggaran BPBD tidak memiliki anggaran untuk pengadaan penyediaan bufferstock natura bagi korban bencana;
- 6) Relokasi untuk korban bencana tanah longsor dan pergerakan tanah di Kampung Panggeleseran dan Cibugis Desa Banyuwangi serta Kampung Simagalih Desa Sukaraksa dan Desa Sukajaya Kecamatan Cigudeg, kemudian ditambah pula kejadian bencana di Desa Sukamulih dan

Pasimadang Kecamatan Sukajaya masih belum dapat terlaksana karena persoalan tanah dan membutuhkan dana yang besar.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) a. Upaya optimalisasi dan pemberdayaan tenaga aparatur yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan BKPP untuk upaya penambahan dan penguatan kapasitas personil sesuai dengan kompetensinya;
b. Diupayakan permohonan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kepada pemerintah pusat dan provinsi.
- 2) Dilakukan penyampaian informasi kebencanaan, baik melalui media poster dan stiker maupun bekerjasama dengan media massa cetak dan elektronik lokal untuk menyampaikan informasi mengenai penanggulangan bencana;
- 3) Untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara pemangku kepentingan dilaksanakan komunikasi baik secara personal maupun kelembagaan serta akan direncanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana;
- 4) Untuk mengatur Belanja Tanggap Darurat penanggulangan Bencana, sesuai ketentuan peraturan perundangan kebencanaan, telah diterbitkan Peraturan Bupati tentang Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana. Sedangkan untuk sistem administrasi pendukungnya dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sehingga aplikasi dari peraturan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk tenaga pendukungnya diupayakan mengoptimalkan tenaga yang ada, termasuk didalamnya pejabat eselonnya.
- 5) Untuk ketidakterersediaan *bufferstock* natura, BPBD bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bogor dan cadangan *bufferstock* di Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk bersama-sama menyalurkan bantuan natura pada saat tanggap darurat.
- 6) a. Terus dilakukan upaya koordinasi dengan pihak Perum Perhutani dan Kementerian kehutanan untuk tanah relokasi;
b. Khusus pendanaan masih dilakukan pengkajian mekanisme pengadaan tanah untuk relokasi korban bencana;
c. BPBD berupaya mengusulkan pembiayaan relokasi pangeleseran ke Pemerintah Pusat dan sampai saat ini masih belum jelas realisasinya;
d. Mengupayakan dibangunnya shelter sebelum proses relokasi dilaksanakan.

18. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Masih Tingginya angka kelahiran 87.362 jiwa (pendataan 2011);
- 2) Masih Tingginya peserta KB yang memakai kontrasepsi hormonal sebanyak 625.726 atau 91.09 persen;
- 3) Masih kurangnya tenaga medis yang mengikuti pelatihan pemasangan IUD dan Implant yang berstandarisasi;
- 4) Masih adanya perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun sebanyak 45.753 atau 5,03 persen dari PUS yang ada;
- 5) Kecenderungan kasus seks pranikah dan kasus kesehatan reproduksi remaja (HIV/AIDS, Narkoba, Aborsi) terus meningkat;
- 6) Jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Bogor sebanyak 430 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan perbandingan 1;2;
- 7) Pada Kegiatan Fasilitasi Harganas, TNI KB terpadu, dan Kesrak PKK banyak Kegiatan yang membutuhkan biaya yang tidak terduga seperti : Recheking kegiatan tingkat Provinsi Jawa Barat untuk lomba: TNI KB Terpadu, Kesrak PKK, KB Kesehatan, Harganas yang membutuhkan biaya besar;
- 8) Pada Kegiatan lomba ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga tidak ada dana untuk hadiah dan operasional recheking lomba tingkat Provinsi Jawa Barat;
- 9) Pembentukan kelompok UPPKS : Tidak ada dana stimulan untuk kelompok, sedangkan hal tersebut sangat diperlukan untuk pengembangan kelompok;
- 10) Pada kegiatan pelatihan keterampilan UEP tahun 2011 tidak ada dana untuk pembelian alat yang ada hanya untuk pembelian bahan keterampilan;
- 11) Pemahaman terhadap hak-hak anak oleh masyarakat masih rendah karena sosialisasi yang akan dilakukan sarannya masih terbatas jumlah anggaran, yaitu Kades 40 orang, PKK 80 orang, OSIS 80 orang dan kader binaan 80 orang;
- 12) Belum semua indikator bisa terpenuhi dengan optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, dan jumlah dinas instansi yang terlibat dalam kegiatan ini baru 30 %, sedangkan jumlah dunia usaha yang terlibat baru 10%;
- 13) Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak belum dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelacakan kasus kekerasan terhadap anak serta anggaran yang ada tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada;

- 14) Belum adanya komitmen pemerintah berupa produk hukum tentang kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dalam hal ini khususnya Instruksi Bupati kepada dinas instansi dan dunia usaha.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi melalui Penyuluhan, sosialisasi program KB;
- 2) Mengurangi terjadinya DO dan alih cara pada kontrasepsi non hormonal;
- 3) Bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat Diklat KB dalam pelaksanaan pelatihan pelayanan Kerencana Berencana;
- 4) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi;
- 5) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang TRIAD KRR melalui PIK Remaja;
- 6) Memberdayakan Tenaga Penggerak Desa dan POS KB desa untuk membantu petugas lini lapangan;
- 7) Berkoordinasi dengan bagian umum Setda Kabupaten Bogor;
- 8) Menggunakan dana bergulir yang bersumber dari APBD I. Dari 12 kelompok yang dibentuk hanya 5 kelompok yang diberi stimulan, hal ini disebabkan karena kurangnya dana yang ada;
- 9) Diusulkan dalam APBD perubahan;
- 10) Melakukan sosialisasi melalui leaflet dan brosur;
- 11) Mengadakan Rakon yang melibatkan unsur dinas terkait, dunia usaha, forum anak, tokoh masyarakat dan PKK;
- 12) Meningkatkan upaya sosialisasi dengan sasaran yang lebih luas dan mengusulkan penyediaan sapras yang mendukung kegiatan sosialisasi;
- 13) Membuat gugus KLA tingkat kabupaten sebagai tim pembina KLA tingkat kecamatan dan desa.

19. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) pada Kegiatan Penyusunan FS Terminal Perbatasan, tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan pengadaan penyediaan jasa konsultan dan waktu pengerjaan penyusunan FS terminal perbatasan tidak mencukupi sampai tahun anggaran 2011;

- 2) pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum tidak tercapai karena kurangnya kesadaran penumpang angkutan umum untuk melakukan naik turun di lokasi terminal;
- 3) pada indikator jumlah terminal tidak tercapai karena kurangnya partisipasi pemilik lahan dalam proses pembebasan lahan untuk rencana pembangunan terminal, sehingga menghambat proses pembangunan terminal.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan FS Terminal Perbatasan diluncurkan pada tahun anggaran 2012;
- 2) Meningkatkan pelayanan dan kebersihan di lingkungan terminal untuk memberikan rasa nyaman kepada penumpang angkutan umum sehingga timbul kesadaran untuk naik dan turun angkutan umum di lingkungan terminal;
- 3) Perlu dilakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan yang di laksanakan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas LLAJ, serta manfaat dari pembangunan tersebut bagi masyarakat. Sehingga pemilik lahan dapat bekerjasama dalam pembebasan lahan.

20. Dinas Komunikasi dan Informasi

Permasalahan dan Solusi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Data untuk Rasio Warnet/Wartel terhadap penduduk belum termutakhirkan, untuk mengatasi hal tersebut diatas maka di tahun 2012 diprogramkan kegiatan Updating Data Pos, Telekomunikasi dan Frekwensi di Kabupaten Bogor;
- 2) Data untuk Jumlah penyiaran Radio/TV Lokal belum termutakhirkan, untuk mengatasi hal tersebut diatas maka di tahun 2012 diprogramkan kegiatan Updating Data Pos, Telekomunikasi dan Frekwensi di Kabupaten Bogor;
- 3) Data untuk persentase penduduk yang menggunakan telepon/hp belum tersedia, untuk mengatasi hal tersebut diatas maka di tahun 2012 diprogramkan kegiatan Updating Data Pos, Telekomunikasi dan Frekwensi di Kabupaten Bogor;
- 4) Data untuk Jumlah Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah belum termutakhirkan, untuk mengatasi hal tersebut diatas maka di tahun 2012 diberitahukan kepada pengelola surat kabar nasional/lokal yang mencari berita di Kabupaten Bogor harus melaporkan mediana;
- 5) Terbatasnya personil yang mempunyai latar belakang Sarjana Komunikasi, untuk mengatasi hal tersebut diatas maka Dinas Komunikasi dan Informasi

mengajukan permohonan kepada BKPP mengenai kebutuhan pegawai yang berlatar belakang Sarjana Komunikasi;

- 6) Terbatasnya kapasitas server LPSE, Web Site Pemerintah Daerah dan Media Center, untuk mengatasi hal tersebut dan dapat terus beroperasinya server, maka server yang ada digunakan/dimanfaatkan secara maksimal dan untuk tahun berikutnya diajukan penambahan server serta penambahan kapasitas;
- 7) Belum maksimalnya pelaksanaan standarisasi dan audit bidang pos dan telekomunikasi dan kurangnya komitmen bersama (masyarakat dan pemerintah) dalam penanganan dan pembinaan bidang pos dan telekomunikasi, untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan penyusunan Protap Pos dan Telekomunikasi serta pelaksanaan sosialisasinya;
- 8) Kurangnya respon PPID pembantu pada setiap SKPD dalam mengikuti rapat koordinasi/ sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi yang dikelola oleh PPID dan PPID Pembantu tidak berjalan secara sinergi maka disusun Peraturan Bupati Bogor tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik yang memuat pembangian tugas PPID dan PPID pembantuan serta layanan informasi publik.

21. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (capaian kinerja output sebesar 33.33%), karena 2 (dua) dari 3 (tiga) output, yaitu pengisian 2 (dua) unit tabung pemadam kebakaran tidak direalisasikan (0%) disebabkan tidak ada kejadian kebakaran di Kantor Kesbangpol dan Linmas dan belanja bahan bakar minyak/gas tidak direalisasikan (0%) karena tidak ada penggunaan genset;
- 2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (capaian kinerja output sebesar 78%);
- 3) Publikasi kinerja SKPD (capaian kinerja output sebesar 58%);
- 4) HUT Linmas (capaian kinerja output sebesar 63%) karena peserta HUT Linmas hanya ada 535 orang dari 850 orang, hal ini disebabkan alasan personal dari 315 orang lainnya;
- 5) Pembinaan Kelinmasan dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan (capaian kinerja output sebesar 98%) karena peserta pelatihan hanya ada 98 orang dari 100 orang yang direncanakan. Hal ini disebabkan alasan personal dari 2 orang lainnya;

- 6) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor (capaian kinerja output sebesar 88%) karena pengadaan alat perekam tidak terealisasi karena harga dipasaran lebih tinggi dari anggaran DPA.

Walaupun kegiatan dapat dilaksanakan dan outputnya tercapai, namun permasalahan yang ada tidak sepenuhnya dapat terselesaikan, seperti :

- 1) Masih adanya aliran/ ajaran sesat dan masalah ijin pendirian rumah ibadah (gereja) yang sering menimbulkan kontroversi dan menimbulkan keresahan masyarakat/ gejolak sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2) Masih kurangnya kuantitas anggota masyarakat sebagai peserta pembinaan dalam peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan kedewasaan berpolitik.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Membuat perencanaan yang lebih matang tentang dana yang diperlukan dan keluaran (output) kegiatan yang dibutuhkan di tahun mendatang;
- 2) - Optimalisasi pembinaan solidaritas dan ikatan sosial, nilai-nilai luhur budaya bangsa, bela negara dan pencegahan berkembangnya aliran/ ajaran sesat.
- Adanya alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan jumlah (kuantitas) anggota masyarakat sebagai peserta pembinaan dalam peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan kedewasaan berpolitik.

22. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor selama tahun 2011, yaitu dalam mencapai target indikator kinerja rasio anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, permasalahan yang muncul adalah jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2011 yang hanya mencapai 247 orang, terdiri dari 212 orang PNS dan 35 orang Non PNS, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2011 pada Renstra adalah 350 anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu mengoptimalkan SDM yang ada, meminta penambahan personil kepada BKPP dan mengajukan penambahan tenaga lapangan (Non PNS) melalui *Outsourcing*.

23. Sekretariat Daerah

Pada tahun 2011, tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Sekretariat Daerah.

24. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Raperda inisiatif hanya tercapai 1 raperda dari target 4 raperda, sehubungan dengan raperda dari eksekutif sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah, antara lain dengan telah disyahkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana seluruh perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah harus segera disesuaikan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009;
- 2) Sisa waktu untuk menyelesaikan 3 raperda inisiatif tidak mencukupi, karena berdasarkan prinsip PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) sebuah peraturan daerah harus disusun secara berencana, terpadu, sistematis dan hierarkis, hal tersebut untuk menjaga agar sebuah peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu sisa 3 raperda inisiatif yang belum terselesaikan pada tahun 2011 akan dijadwalkan kembali pembahasannya pada tahun 2012.

25. Inspektorat Kabupaten

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor selama tahun 2011, yaitu masih ada tindak lanjut hasil audit pada Asisten Pemerintahan SETDA Kabupaten Bogor yang belum diselesaikan 100%, yaitu berupa penggantian barang untuk publikasi perundang-undangan yang tidak dilaksanakan dengan nilai Rp.15.600.000,-.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Pengembalian ke kas daerah dengan diberikan jangka waktu tertentu, dan sampai saat ini baru ditindak lanjuti sebesar Rp.3.000.000,- masih tersisa sebesar Rp.12.600.000,-;
- 2) Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres tindak lanjut tersebut.

26. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor selama tahun 2011, yaitu masih ada tindak lanjut hasil audit pada Asisten Pemerintahan SETDA Kabupaten Bogor yang belum diselesaikan 100%, yaitu berupa penggantian barang untuk publikasi perundang-undangan yang tidak dilaksanakan dengan nilai Rp.15.600.000,-.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu:

- 1) Pengembalian ke kas daerah dengan diberikan jangka waktu tertentu, dan sampai saat ini baru ditindak lanjuti sebesar Rp.3.000.000,- masih tersisa sebesar Rp.12.600.000,-;
- 2) Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres tindak lanjut tersebut.

27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2011, tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

28. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Kurangnya SDM di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- 2) Belum terbentuknya Badan Pelaksana Olahraga KORPRI (BAPOR);
- 3) Belum adanya Kegiatan Pemberian Bantuan Konsultasi dan Mediasi Hukum bagi Anggota KORPRI pada tahun 2013;
- 4) Masih rendahnya kesejahteraan anggota KORPRI.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu:

- 1) Dioptimalkan kinerja SDM di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk dipenuhinya kebutuhan pegawai;
- 2) Dilaksanakannya pembentukan Badan Pelaksana Olahraga KORPRI (BAPOR) pada tahun 2013;
- 3) Dilaksanakan Pemberian Bantuan Konsultasi dan Mediasi Hukum bagi Anggota KORPRI pada tahun 2013;

- 4) Adanya peningkatan bantuan kesejahteraan dari 2 (dua) peruntukan menjadi 4 (empat) peruntukan diantaranya bantuan kesejahteraan bagi anggota KORPRI (1) pensiun/purna bhakti, (2) Sakit, (3) Meninggal Dunia dan (4) Bantuan pendidikan / beasiswa bagi putra-putri anggota KORPRI yang berprestasi.

29. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa, hal ini disebabkan masih rendahnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan di desa;
- 2) Masih rendahnya kinerja pemerintahan desa yang dikarenakan rendahnya SDM aparat pemerintah desa.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Fasilitasi, motivasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar ada pemahaman yang jelas tentang pembangunan;
- 2) Diadakan pelatihan teknis secara berkala kepada aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas SDM.

30. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Belum adanya kendaraan operasional pengangkut arsip, dan penerangan arsip guna mengoptimalkan penarikan arsip pada SKPD, desa maupun masyarakat;
- 2) Masih kurangnya sarana rak arsip bertingkat untuk menyimpan arsip-arsip SKPD yang tersimpan di depo KAPD, sehingga ini berdampak pada kondisi arsip SKPD yang belum seluruhnya dapat tersimpan pada rak arsip depo KAPD;
- 3) Perlu adanya perluasan ruangan depo yang ada mengantisipasi semakin banyaknya volume arsip yang disimpan di depo KAPD;

- 4) Masih kurangnya tenaga pustakawan yang dimiliki KAPD sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pembinaan perpustakaan di wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas dan berpenduduk banyak;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan berbasis komputer (*electronic*) bagi upaya peningkatan layanan perpustakaan;
- 6) Masih kurangnya sinergitas antara pengelolaan arsip manual dengan pengelolaan arsip secara elektronik, sehingga menimbulkan gap antara pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran KAPD pada khususnya;
- 7) Masih belum adanya peraturan hukum yang memayungi KAPD untuk menjadi Instansi penghasil retribusi layanan arsip swasta, sehingga mampu mendongkrak PAD Kabupaten Bogor;
- 8) Masih kurangnya anggaran untuk menyediakan koleksi bahan pustaka, bertambahnya jumlah penduduk yang harus dibina untuk gemar membaca jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan sarana dan prasarana perpustakaan;
- 9) Masih kurangnya Perpustakaan Desa, saat ini terdapat 180 Perpustakaan Desa dari 430 Desa/Kelurahan;
- 10) Belum optimalnya Perpustakaan Desa dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat;
- 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan Desa;
- 12) Belum adanya sarana dan prasarana perpustakaan di tingkat Kecamatan.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Menganggarkan pada dokumen anggaran secara terencana untuk menjamin ketersediaan kendaraan operasional roda empat bagi optimalisasi layanan bidang kearsipan pada aparat maupun masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan pengadaan rak arsip bertingkat secara bertahap dan berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi maupun Lembaga Arsip Nasional (ANRI);
- 3) Merencanakan dan menganggarkan untuk perluasan lahan dan depo KAPD untuk menjamin ketersediaan ruangan bagi penyimpanan arsip SKPD;
- 4) Mengusulkan pada BKPP untuk menerima pegawai yang berlatarbelakang pustakawan pada penerimaan CPNS tahun berikutnya;
- 5) Mengirimkan pegawai KAPD untuk mengikuti bimtek, pelatihan bidang perpustakaan;

- 6) Merubah status organisasi dari Kantor menjadi Badan agar layanan kearsipan dan perpustakaan dapat menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bogor;
- 7) Membangun sarana dan prasarana fisik dan non fisik perpustakaan Kecamatan untuk meningkatkan aksesibilitas minat baca masyarakat kecamatan;
- 8) Mengoptimalkan Perpustakaan Desa dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi Perpustakaan Desa di Kabupaten Bogor;
- 9) Menyediakan sarana "Pusling Motor" bagi Kecamatan, sehingga kecamatan dapat terlayani dengan kendaraan perpustakaan keliling yang lebih efektif dan efisien.

31. Dinas Peternakan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2011 adalah:

- 1) Masih rendahnya pencapaian konsumsi protein hewani asal ternak dan konsumsi ikan per kapita. Hal tersebut disebabkan tingkat preferensi (kesukaan) dan daya beli masyarakat terhadap konsumsi daging, telur & susu relatif rendah;
- 2) Terbatasnya aksesibilitas peternakan dan pembudidaya ikan terhadap pasar, teknologi dan sumber permodalan;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam produksi ternak dan ikan, serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- 4) Rendahnya koordinasi dalam pengaturan usaha peternakan, sehingga menyebabkan tingginya resistensi masyarakat terhadap kegiatan usaha peternakan eksisting khususnya ternak unggas;
- 5) Rendahnya tingkat penggunaan bibit ternak unggul untuk komoditas peternakan dan induk/benih yang unggul untuk komoditas perikanan;
- 6) Masih adanya potensi resiko penularan penyakit hewan menular dan zoonosis serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan penyakit tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun anggaran 2011, maka solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan tingkat preferensi masyarakat terhadap konsumsi daging, telur dan susu melalui sosialisasi gemar makan daging, ikan, telur, susu dan diversifikasi pengolahan daging, ikan, telur dan susu (baso, sosis, nugget, yoghurt, es krim dan sebagainya);

- 2) Meningkatkan pembinaan permodalan dan pemasaran terhadap kelompok usaha peternakan dan perikanan melalui kegiatan temu usaha perikanan, promosi atas hasil usaha, pengembangan pengolahan hasil produk, pengelolaan informasi pemasaran, pembangunan depo ikan hias, pemberian bantuan ternak dan ikan, serta fasilitasi permodalan dengan pemanfaatan modal kredit yang berasal dari pemerintah dan perbankan;
- 3) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana peternakan melalui renovasi pembibitan ternak unggas (RRMC) rehabilitasi stasiun pembibitan ternak Nanggung Pengembangan sarana perikanan melalui revitalisasi Balai Benih Ikan. Pengembangan sarana Kesmavet melalui renovasi dan pembangunan RPH;
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan dan ikan melalui kegiatan pengawasan mutu bibit ternak dan ikan, pengawasan kualitas pakan dan sosialisasi keamanan pangan. Disamping itu, meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular melalui kegiatan vaksinasi penyakit hewan menular dan zoonosis, kaderisasi vaksinator dan pengawasan lalu lintas ternak dan ikan;
- 5) Meningkatkan tingkat penggunaan bibit ternak induk/benih ikan unggul melalui: fasilitasi bantuan bibit ternak dan induk/benih ikan unggul kepada masyarakat peningkatan pelayanan BBI untuk memproduksi induk/ benih unggul, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan balai/lembaga penelitian;
- 6) (a) Meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyakit hewan menular melalui kegiatan vaksinasi penyakit menular dan zoonosis, pelayanan kesehatan hewan dan ikan, kaderisasi vaksinator, dan pengawasan lalu lintas ternak. (b) Meningkatkan pengawasan terhadap pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan dan ikan melalui kegiatan pengawasan mutu bibit ternak dan ikan, pengawasan dan pemeriksaan pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan, pengawasan kualitas pakan serta sosialisasi keamanan pangan.

32. Dinas Pertanian dan Kehutanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor selama tahun 2011, yaitu Ketersediaan pangan utama, produksi ubi jalar, produksi talas, produksi ubi kayu, produktivitas padi sawah, produktivitas padi gogo, produksi manggis dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, sedangkan langkah-langkah yang diupayakan

untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, pengendalian hama penyakit, perbaikan irigasi dan pengurangan tingkat kehilangan hasil. Rehabilitasi lahan kritis akan ditingkatkan melalui penanganan lahan kritis baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

33. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan BP4K Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat alih fungsi lahan produktif usaha tani/ternak/pembudidaya/kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya;
- 2) Belum optimalnya sinergitas kegiatan dalam mendukung pembangunan di setiap zona;
- 3) Belum optimalnya fasilitasi sarana produksi, finansial dan kemitraan, serta jejaring pemasaran produk bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Belum optimalnya pemenuhan persyaratan legalitas formal kelas kemampuan kelompok tani/ternak/pembudidaya/kehutanan;
- 5) Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa; dan
- 6) Belum optimalnya tingkat pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan, khususnya dalam aplikasi metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan, serta upaya optimalisasi pemanfaatan lahan usaha melalui intensifikasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi melalui Komisi Penyuluhan Kabupaten (KPK) sebagai upaya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap zona pembangunan;
- 3) Penetapan zonasi pembinaan penyuluhan, dengan menerapkan keterpaduan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi, finansial dan kemitraan jejaring

- pemasaran produk, tanpa mengesampingkan pemerataan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan;
- 4) Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok tani/ternak/pembudidaya/kehutanan yang belum memenuhi standar persyaratan legalitas formal kelas kemampuan kelompok;
 - 5) Pelaksanaan mimbar sarasehan, seminar, lokakarya, rembung dan temu teknis dalam rangka transfer inovasi teknologi dengan keterlibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa melalui rapat minggon dan forum koordinasi lainnya; dan
 - 6) Melaksanakan koordinasi dan upaya sinergitas pembiayaan penyuluhan dengan unsur pemerintahan terkait baik di tingkat pusat maupun provinsi.

34. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor selama tahun 2011, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian nilai ratio elektrifikasi (RE) pada tahun 2011 mencapai 81,52%. Peningkatannya sekitar 0,43 % dari nilai RE 81,09% pada tahun 2010. Realisasi pencapaian nilai RE pada akhir tahun 2011 telah memenuhi target, namun rumah tangga yang belum berlistrik di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi. Pola permukiman yang tersebar serta kondisi geografis medan yang relatif sulit merupakan faktor utama yang mengakibatkan kecilnya peningkatan RE yang dapat dipenuhi, sehingga porsi biaya pembangunan jaringan listrik jauh lebih besar dari pada biaya sambungan rumah dan instalasi rumah. Sementara perhitungan ratio elektrovitas (RE) didasarkan atas jumlah sambungan rumah (SR/IR), dan pemanfaatan energi terbarukan juga masih sangat kurang;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Migas, Panas Bumi dan Ketenagalistrikan, serta perlu dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah tentang pengelolaan air bawah tanah. Hal ini memberikan hasil yang kurang maksimal pada pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- 3) Tingginya potensi bencana dari gerakan tanah longsor di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor;
- 4) Kurangnya kesadaran pengusaha (industri) untuk melakukan daftar ulang maupun memproses izin baru ke BPT dengan berkoordinasi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Serta masih adanya SPBU yang tidak melaporkan data distribusi BBM setiap bulannya;

- 5) Kurangnya personil, sarana dan prasarana, serta terbatasnya anggaran kegiatan, di dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk menjangkau luasnya wilayah Kabupaten Bogor;
- 6) Terlambatnya proses pengadaan pemenang lelang barang/jasa untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sehingga mengakibatkan belanja biaya modal lambat terealisasi.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

- 1) Untuk lokasi pemukiman yang terletak jauh dari jaringan listrik yang ada serta pada medan yang sulit, maka perlu diupayakan pemenuhan sumber energi listriknya melalui sumber energi alternatif seperti energi mikro hidro, energi surya, energi piko hidro, dan tenaga angin. Selain itu perlu juga diupayakan pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi;
- 2) Diperlukannya upaya strategis untuk tahun mendatang dengan membuat perencanaan yang didukung oleh Peraturan Daerah tentang Migas, Panas Bumi dan Ketenagalistrikan, serta anggaran yang bersinergi pada kesinambungan kinerja dinas sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian visi dan misi;
- 3) Melakukan pemantauan pada daerah potensi bencana dari gerakan tanah longsor dan melakukan sosialisasi pada masyarakat yang berada di sekitar daerah rawan longsor serta melakukan relokasi pada wilayah yang aman.
- 4) Melakukan sistem jemput bola ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan daftar ulang dan untuk mendapatkan data;
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Dimungkinkan untuk melakukan monitoring dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan diharapkan pada tahun yang akan datang jumlah personil lebih meningkat sehingga pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan lebih maksimal. Juga di dalam melaksanakan kegiatan harus meminimalkan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas kegiatan;
- 6) Melakukan koordinasi dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk segera dilaksanakan proses pelelangan dan menentukan pemenangnya sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan.

35. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2011 adalah :

- 1) Belum meratanya kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bogor;
- 2) Masih kurang dikenalnya daya tarik wisata yang berada di luar kawasan Puncak;
- 3) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di kawasan pariwisata, terutama pada saat *peak season*;
- 4) Sarana dan prasarana di beberapa kawasan pariwisata masih belum memadai;
- 5) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata baik di tingkat aparatur pemerintah maupun di lingkungan pelaku usaha pariwisata;
- 6) Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinergitas antar *stake holder* pariwisata;
- 7) Status tanah masih menjadi kendala dalam pengembangan sarana dan daya tarik wisata;
- 8) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Sadar Wisata;
- 9) Masih belum optimalnya pengembangan seni budaya daerah.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2011, maka solusi yang dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan daya tarik melalui penataan sumber daya pariwisata dan pengembangan daya tarik wisata yang sudah ada;
- 2) Meningkatkan penyebaran informasi pariwisata seluas-luasnya melalui media, pameran dan sarana lainnya;
- 3) Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mendukung kelancaran kegiatan pariwisata;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha, masyarakat dan aparat pemerintah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, iklim usaha yang baik dan terwujudnya *sapta pesona*;
- 6) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata di wilayahnya melalui sosialisasi Sadar Wisata;
- 7) Mendorong pertumbuhan kegiatan seni budaya daerah melalui berbagai event budaya.